



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
melayani  
bangsa



## LAPORAN KINERJA

# 2021



**SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

## Kata Pengantar

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Setmenko Marves) Tahun 2021 dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas untuk mewujudkan transparansi dalam penggunaan dana publik. Laporan ini juga sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 guna pencapaian visi dan misi Setmenko Marves.

Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dimaksudkan untuk melaporkan capaian kinerja unit kerja dalam rangka penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja unit kerja. Selain itu, penyusunan laporan ini juga mengacu pada Rencana Strategis Setmenko Marves Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2021 berisikan capaian kinerja Setmenko Marves berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani yang meliputi 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama. Terima kasih kepada seluruh pegawai yang telah memberikan segenap pikiran dan tenaganya dalam menjalankan tugas, semoga laporan ini dapat memberikan faedah bagi segenap pemangku kepentingan dimanapun berada. Dengan dukungan Anda semua, Setmenko Marves siap mengupayakan yang terbaik guna mendukung aktivitas semua unsur di Kemenko Marves.

Dengan tersusunnya laporan Kinerja Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna. Oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya.

Jakarta,            Pebruari 2022  
Sekretaris Kementerian Koordinator,



**Ayodhia G. L. Kalake**



Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Setmenko Marves) diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Setmenko Marves Tahun 2021. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Setmenko yaitu membantu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang (Kemenko) Marves.

Dalam mencapai tujuannya, Kemenko Marves telah mengadopsi sistem *Balanced Scorecard* sebagai metode/alat bantu dalam pengelolaan dan pengukuran kinerja. Pencapaian kinerja Setmenko diukur dengan Indikator Kinerja (IK) yang dirinci sesuai target setiap tahunnya. Indikator Kinerja merupakan ukuran kinerja hasil (*outcome*) yang dihasilkan pada unit kerja eselon I atau melalui kinerja keluaran (*output*) dari unit kerja eselon II dibawahnya yaitu berupa indikator kinerja kegiatan.

Capaian kinerja Setmenko Marves tahun 2021 adalah sebesar 97,58%. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,1% dimana kinerja Setmenko Marves pada tahun 2020 adalah sebesar 102,68%. Dari 16 IKU, jumlah IKU yang dapat mencapai target adalah sebanyak 9 IKU atau sebesar 56,25%. Sedangkan IKU yang belum mencapai target adalah sebanyak 7 IKU atau sebesar 43,75%.

IKU yang mencapai target sebagai berikut:

1. IKU 6 Opini BPK atas Laporan Keuangan sebesar 100%;
2. IKU 7 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP sebesar 100%;
3. IKU 8 Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi sebesar 100%;
4. IKU 11 Persentase Temuan Finansial BPK sebesar 120%;
5. IKU 12 Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu sebesar 100%;
6. IKU 13 Persentase SDM yang Kompeten sebesar 120%;
7. IKU 14 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko sebesar 106,25%;
8. IKU 15 Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko sebesar 102,67%;
9. IKU 16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko sebesar 100,23%.

Sedangkan IKU yang belum mencapai target yaitu:

1. IKU 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves sebesar 93,98%;
2. IKU 2 Nilai SAKIP Kemenko Marves sebesar 85,74%;
3. IKU 3 Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan sebesar 84,29%;
4. IKU 4 Indeks SPBE sebesar 93,33%;
5. IKU 5 Indeks Profesionalitas ASN sebesar 66,49%;
6. IKU 9 Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi sebesar 96%;
7. IKU 10 Persentase Pejabat yang sesuai Standar Kompetensi sebesar 92%;

Berdasarkan analisa lebih jauh, maka capaian *Stakeholders Perspective* adalah sebesar 93,98%, capaian *Customer Perspective* sebesar 85,97%, *Internal Business Process* tercapai sebesar 101,33% dan *Learning and Growth* tercapai sebesar 107,28%. Selain adanya *refocusing* anggaran, capaian kinerja Setmenko Marves juga dipengaruhi oleh kondisi dalam

dua tahun terakhir menghadapi pandemic covid 19, sehingga membuat capaian kinerja tidak optimal.

Pagu anggaran awal Setmenko Marves tahun 2021 adalah sebesar Rp174.096.418.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), setelah melalui 4 (empat) kali *refocusing* dengan total *refocusing* sebesar Rp 4.374.279.000,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp169.722.139.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp169.250.762.013,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Belas Rupiah) atau 99,72%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp471.376.987,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

<b>UNIT KERJA</b>	<b>Pagu Awal</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>Setmenko</b>	<b>174.096.418.000,00</b>	<b>169.722.139.000</b>	<b>169.250.762.013</b>	<b>99,72</b>
<b>Biro Hukum</b>	8.000.000.000,00	6.410.329.000	6.402.880.632	99,88
<b>Biro Komunikasi</b>	28.300.000.000,00	26.600.000.000	26.566.994.317	99,88
<b>Biro Perencanaan</b>	10.000.000.000,00	8.032.177.000	8.020.304.645	99,85
<b>Biro Umum</b>	123.796.418.000,00	125.592.857.000	125.178.080.971	99,67
<b>Inspektorat</b>	4.000.000.000,00	3.086.776.000	3.082.501.448	99,86

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	2
1.2 Organisasi dan Personalia.....	3
1.3. Potensi dan Permasalahan .....	4
1.4. Sistematika Penyajian.....	6
<b>II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Rencana Strategis.....	8
2.2 Program dan Kegiatan .....	11
2.3 Perjanjian Kinerja .....	13
2.4 Pengukuran Kinerja .....	14
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	17
Sasaran Strategis 1 .....	19
Sasaran Strategis 2 .....	21
Sasaran Strategis 3 .....	30
Sasaran Strategis 4.....	31
Sasaran Strategis 5.....	33
Sasaran Strategis 6.....	34
Sasaran Strategis 7 .....	36
Sasaran Strategis 8 .....	40
Sasaran Strategis 9 .....	42
Sasaran Strategis 10.....	45
3.2 Realisasi Anggaran .....	48
3.3 Dukungan Sumber Daya Manusia .....	49
3.4 Analisa Sumberdaya Anggaran.....	49
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2. Langkah Perbaikan.....	56
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>58</b>



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### Daftar Tabel

<b>Tabel 1.</b> Sasaran Strategis Setmenko Marves 2020-2024 .....	9
<b>Tabel 2.</b> Program Setmenko Marves Tahun 2020-2024.....	11
<b>Tabel 3.</b> Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 .....	12
<b>Tabel 4.</b> Rincian Target Kinerja Setmenko Marves 2021 .....	13
<b>Tabel 5.</b> Komposisi bobot IKU terhadap tingkat kendali dan tingkat validitas .....	14
<b>Tabel 6.</b> Bobot bukti hasil kinerja .....	14
<b>Tabel 7.</b> Capaian Kinerja Tahun 2021.....	18
<b>Tabel 8.</b> Capaian Kinerja SS.1 .....	19
<b>Tabel 9.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves .....	20
<b>Tabel 10.</b> Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Tahun 2016-2020.....	21
<b>Tabel 11.</b> Capaian Kinerja SS.2 .....	21
<b>Tabel 12.</b> Capaian Kinerja IKU Nilai SAKIP Kemenko Marves.....	22
<b>Tabel 13.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Nilai SAKIP Kemenko Marves.....	22
<b>Tabel 14.</b> Capaian IKU Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan .....	23
<b>Tabel 15.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan .....	24
<b>Tabel 16.</b> Capaian IKU Indeks SPBE .....	25
<b>Tabel 17.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Indeks SPBE .....	25
<b>Tabel 18.</b> Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN .....	26
<b>Tabel 19.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Indeks Profesionalitas ASN .....	26
<b>Tabel 20.</b> Capaian IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan .....	28
<b>Tabel 21.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan .....	28
<b>Tabel 22.</b> Capaian Kinerja SS.3 .....	30
<b>Tabel 23.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP .....	30
<b>Tabel 24.</b> Capaian Kinerja SS.4 .....	31
<b>Tabel 25.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi.....	32
<b>Tabel 26.</b> Capaian Kinerja SS.5 .....	33
<b>Tabel 27.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi ....	34
<b>Tabel 28.</b> Capaian Kinerja SS.6 .....	35
<b>Tabel 29.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU 10.....	35
<b>Tabel 30.</b> Pejabat yang Sesuai Standar Kompetensi Tahun 2021 .....	36
<b>Tabel 31.</b> Capaian Kinerja SS.7 .....	36
<b>Tabel 32.</b> Capaian IKU Persentase Temuan Finansial BPK Tahun 2021 .....	37
<b>Tabel 33.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Temuan Finansial BPK .....	37
<b>Tabel 34.</b> Hasil Pengolahan atas Hasil Pengawasan BPK terhadap LK Kemenko Marves .....	37
<b>Tabel 35.</b> Capaian IKU Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu Tahun 2021.....	38
<b>Tabel 36.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu .....	38
<b>Tabel 37.</b> Capaian Kinerja SS.8 .....	40
<b>Tabel 38.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase SDM yang Kompeten.....	40
<b>Tabel 39.</b> Data PNS Fungsional Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan .....	41
<b>Tabel 40.</b> Capaian Kinerja SS.9 .....	42
<b>Tabel 41.</b> Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko Tahun 2021 .....	43
<b>Tabel 42.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko .....	43

<b>Tabel 43.</b> Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Tahun 2016-2020.....	44
<b>Tabel 44.</b> Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko Tahun 2021 .....	45
<b>Tabel 45.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko.....	45
<b>Tabel 46.</b> Capaian Kinerja SS.10 .....	46
<b>Tabel 47.</b> Perbandingan Capaian dan Target IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko .....	46
<b>Tabel 48.</b> Data Realisasi Per Unit Kerja.....	48
<b>Tabel 49.</b> Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Setmenko Marves .....	49

## Daftar Gambar

<b>Gambar 1.</b> Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko Marves .....	4
<b>Gambar 2.</b> Peta Strategis Setmenko Marves .....	9

## Daftar Grafik

<b>Grafik 1.</b> Data PNS Struktural Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan .....	41
<b>Grafik 2.</b> Data PNS Mengikuti Pelatihan Klasikal .....	42
<b>Grafik 3.</b> Grafik Nilai IKPA Tahun 2021 .....	47
<b>Grafik 4.</b> Diagram Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	48
<b>Grafik 5.</b> Jumlah Pegawai Lingkup Setmenko Marves.....	49

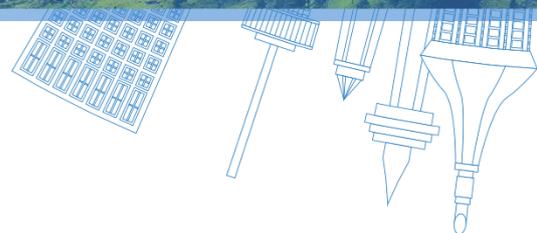


## DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ASN	: Aparatur Sipil Negara
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IP ASN	: Indeks Penilaian Aparatur Sipil Negara
Kemenko Marves	: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Menko	: Menteri Koordinator
PDB	: Produk Domestik Bruto
RB	: Reformasi Birokrasi
Renstra	: Rencana Strategis
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja
Setmenko Kemaritiman	: Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Sesmenko Kemaritiman	: Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
SPIP	: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SS	: Sasaran Strategis
TA	: Tahun Anggaran
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKM	: Tingkat Keselamatan Maritim
TKW	: Tingkat Kepastian (ke)Wilayahan
TKKM	: Tingkat Keamanan dan Ketahanan Maritim
WTP	: Wajar Tanpa Pengecualian



# PENDAHULUAN



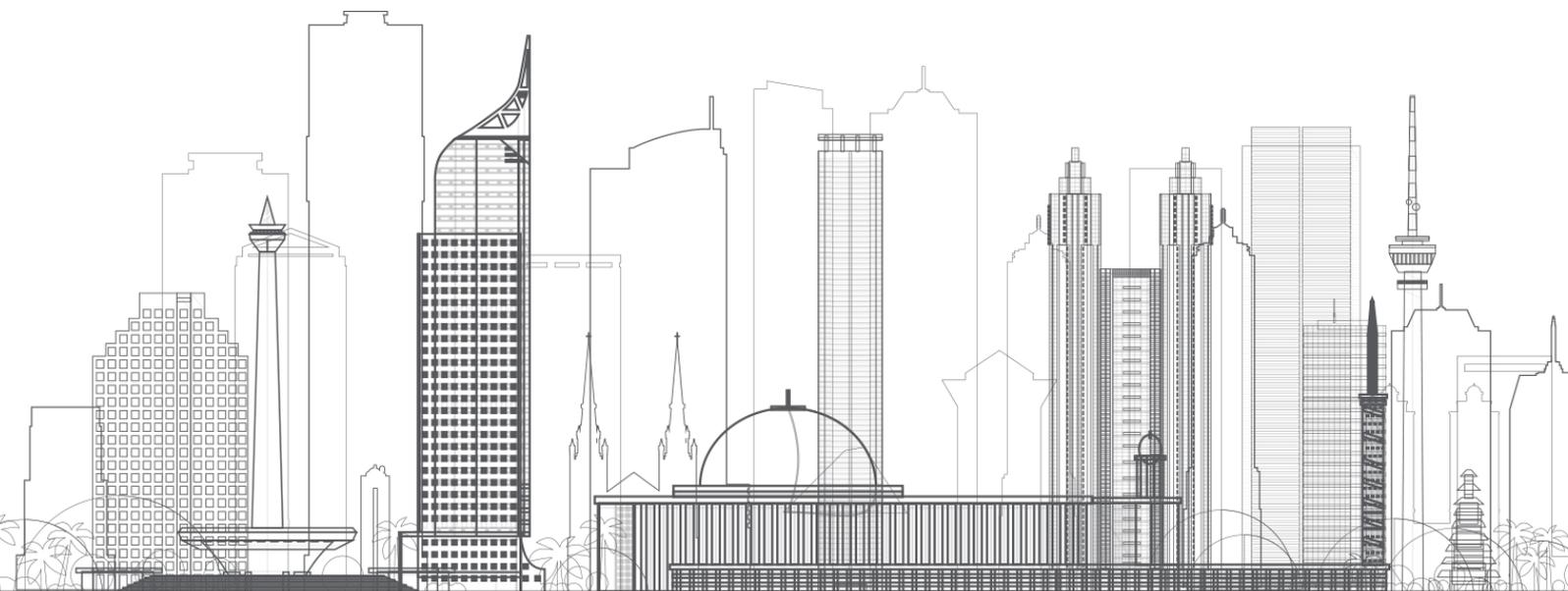
## I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka Setmenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis Setmenko Marves Tahun 2020-2024.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pencapaian kinerja, maka disusunlah laporan Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Setmenko Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

### 1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:





## 1.2 Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdiri dari:

### Biro Perencanaan

- Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemberian dukungan di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja, pengelolaan kebijakan strategis, dan pengelolaan persidangan



### Biro Hukum

- Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi peraturan perundangundangan, advokasi hukum, pemberian dukungan kerja sama, dan penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko Marves



### Biro Komunikasi

- Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketatausahaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kemenko Marves

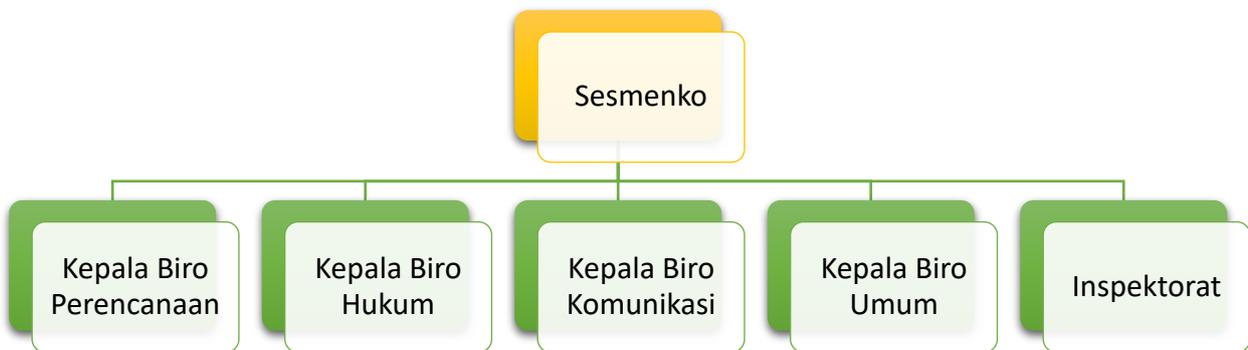


### Biro Umum

- Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemenko Marves



Selain membawahi 4 (empat) biro tersebut di atas, Setmenko Marves, atas nama Menteri Koordinator, juga mengoordinasikan unit kerja Inspektorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kemenko Marves. Bagan struktur organisasi Setmenko dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Sekretariat Kemenko Marves

Dalam struktur organisasi Kemenko Marves, sesuai dengan Permenko Nomor 10 Tahun 2020, Inspektorat di bawah perintah langsung Menteri Koordinator. Namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator. Sehingga dalam penyajian Laporan Kinerja Setmenko ini memasukan capaian kinerja yang dihasilkan/menjadi tanggung jawab Inspektorat.

### 1.3. Potensi dan Permasalahan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Setmenko Marves dihadapkan dengan berbagai isu strategis sebagaimana dijelaskan dalam poin-poin berikut.

#### 1.3.1 Lingkungan Internal

- Sumberdaya Manusia

Pada saat awal Kemenko Marves diisi oleh ASN yang berasal dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah yang relatif bukan ASN muda. Penerimaan ASN baru dilaksanakan 3 (tiga) angkatan tahun 2018, 2019, dan 2020 sehingga terdapat *gap* usia dalam struktur usia ASN Kemenko. Hal ini sedikit banyak dalam jangka panjang akan berpengaruh terhadap regenerasi ASN yang kompeten.

Meskipun terdapat *gap* dari sisi usia dan pengalaman, dalam tiga tahun terakhir Kemenko Marves melakukan rekrutmen pegawai. Dari hasil rekrutmen ini banyak masuk tenaga muda milenial yang memiliki potensi besar. Namun demikian, pegawai baru milenial tersebut perlu diberikan bimbingan dan kepercayaan dalam pelaksanaan tugas.

- Dukungan Sarana dan Prasarana

Dengan adanya penambahan unit kerja eselon I dan II lingkup Kemenko Marves, dibutuhkan penambahan dukungan sarana dan prasarana kerja yang dipenuhi secara bertahap. Selain penyediaan ruang kerja, terdapat pula dukungan sarana prasarana transportasi berupa kendaraan bermotor serta sarana prasarana TIK untuk menunjang tugas-tugas dan tanggung jawab Sekretariat Kementerian Koordinator

dalam menyelenggarakan SPBE. Ini merupakan kekuatan yang harus dibangun, dikembangkan dan dipelihara terus menerus.

- Dukungan Anggaran

Sekretariat Kemenko Marves sejak awal dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendapatkan dukungan yang cukup memadai. Dukungan anggaran dimaksud sebagian besar digunakan untuk menyiapkan sarana-prasarana, pengembangan kompetensi SDM dan biaya operasional kantor.

- Dukungan Kelembagaan dan Regulasi

Dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang tugas, penguatan organisasi, implementasi proses bisnis dan SOP, serta implementasi budaya kerja.

### 1.3.2 Lingkungan Eksternal

- Regulasi dan Kebijakan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Tugas jajaran Sekretariat Kementerian Koordinator terkait dengan arahan pertama, Pembangunan sumberdaya manusia, dan arahan ke-4, penyederhanaan birokrasi.

Arahan untuk penyederhanaan birokrasi yang ditindaklanjuti dengan pemangkasan sejumlah struktur eselon 3 dan 4, merupakan tantangan tersendiri bagi jajaran Sekretariat Kementerian Koordinator. Penyederhanaan Birokrasi ini akan memengaruhi tata kelola kelembagaan yang selama ini dijalankan.

- Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah begitu pesat. Berbagai aplikasi berbasis TIK dalam pengelolaan pemerintahan telah tersedia dan/atau dapat dibangun. Hal ini akan memberikan kemudahan, meningkatkan akurasi dan mempercepat pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

Teknologi informasi dan komunikasi dalam birokrasi saat ini telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain Pengelolaan keuangan dan BMN, Penganggaran pembangunan, Pengelolaan kinerja, Pengelolaan kepegawaian, Pengelolaan data, dan lain-lain.

- Kondisi Lingkungan

Faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi pekerjaan di bidang kesekretariatan adalah faktor lingkungan, baik lingkungan hidup, sosial ekonomi maupun lainnya. Ada dua fenomena penting yang saat ini merupakan tantangan bagi penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan dari aspek lingkungan, yaitu Pandemi Covid-19 dan Paham Radikalisme.

Pandemi Covid-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat termasuk merubah tatanan birokrasi. Prinsip pencegahan Covid-19 dengan melaksanakan

*physical* dan/atau *social distancing* menghasilkan tradisi baru dalam bekerja, yaitu *work from home* bagi sebagian ASN. Para ASN yang masuk dalam kategori berisiko tinggi disarankan bekerja dari rumah.

Disamping itu, pertemuan yang berpotensi membuat kerumunan massal harus dikurangi. Pasca pandemi, kebiasaan baru ini masih harus tetap dijalankan.

Dalam bidang sosial politik, sebagai dampak perkembangan teknologi informasi, berkembang pula paham radikalisme yang dapat membahayakan ketahanan negara. Ini juga menjadi tantangan untuk membentengi ASN dari paham radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan azas negara Pancasila.

#### **1.4. Sistematika Penyajian**

Pada dasarnya laporan ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Setmenko Marves tahun 2021. Kemudian membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) sebagai tolak ukur keberhasilan dari hasil analisis terhadap capaian kinerja tersebut, sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut di atas, sistematika penyajian Laporan Kinerja tahun 2021 Setmenko Marves adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan;** Pada bab ini menjelaskan secara umum tentang: tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, sumberdaya Setmenko Marves serta sistematika penyajian.

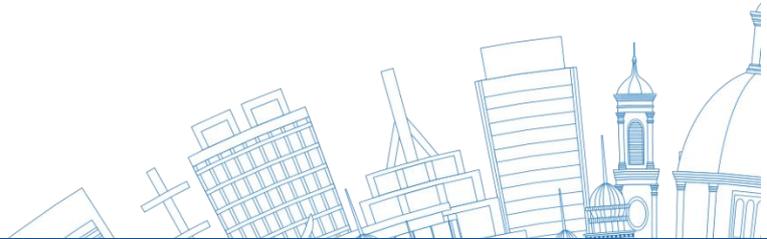
**Bab II Perencanaan Kinerja;** Diuraikan mengenai: rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2021, pengukuran kinerja organisasi.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja;** Pada bab ini diuraikan mengenai:

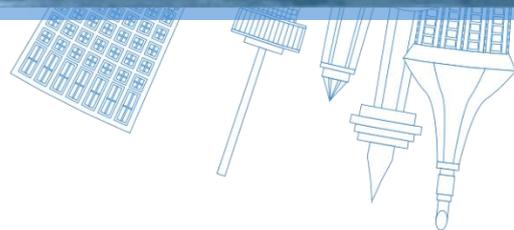
- 1) Realisasi Kinerja Setmenko Marves
- 2) Realisasi Anggaran
- 3) Realisasi Kinerja lainnya
  - Tugas Tambahan program dan kegiatan Setmenko Marves;
  - Capaian lainnya.

**Bab IV Penutup;** Berisikan penjelasan kesimpulan dan tindaklanjut dimasa depan

**Lampiran;** PK Tahun 2021 dan lainnya.



# PERENCANAAN KINERJA



## II. PERENCANAAN KINERJA

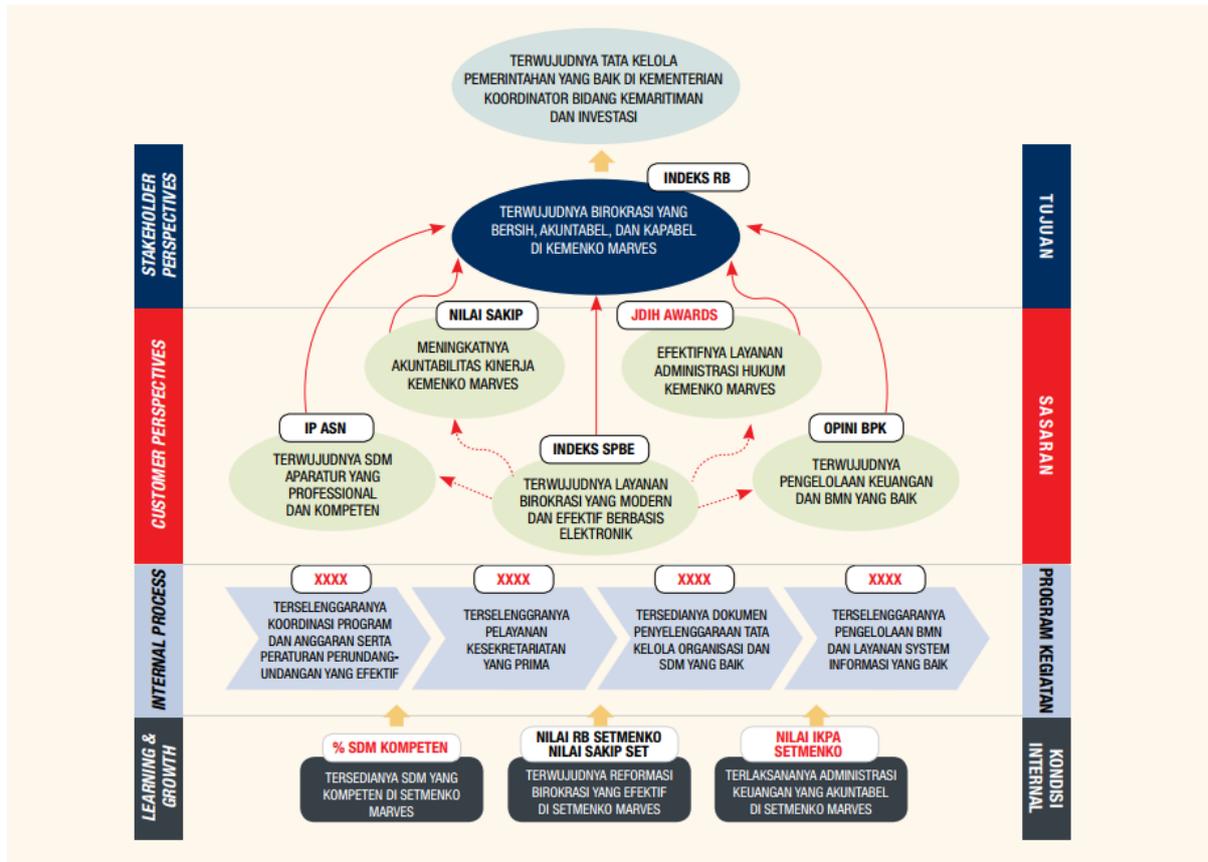
Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Setmenko Marves diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Setmenko Kemaritiman dan Investasi sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada periode masing-masing.

### 2.1 Rencana Strategis

Setmenko Marves sebagai organisasi unit kerja yang ada di lingkungan Kemenko Marves guna mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden di bidang Kemaritiman dan Investasi, memiliki tujuan dan sasaran guna mewujudkan Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia dalam mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong. Berdasarkan Renstra Setmenko Marves tahun 2020-2024 Sekretariat Kemenko mempunyai tujuan untuk Mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel di Kemenko Marves. Rumusan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi Setmenko sesuai Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves;
2. Sekretariat Koordinator merupakan unit kerja pendukung bagi unit kerja eselon I lainnya di lingkup Kemenko Marves agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal;
3. Budaya kerja organisasi di Kemenko Marves yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaktif, Kolaboratif (BerAKHLAK).

Perencanaan Strategis pada prinsipnya merencanakan kondisi akhir (visi, tujuan dan sasaran) dan cara mencapai kondisi akhir (misi, strategi dan program) serta indikator keberhasilannya. Untuk menjelaskan hubungan antara kondisi akhir dan cara menyapai kondisi akhir dengan indikator keberhasilannya tersebut menggunakan pendekatan *Balanced Score Card* (BSC) yang digambarkan dalam bentuk peta strategis sebagai berikut:



**Gambar 2.** Peta Strategis Setmenko Marves

Peta strategis Setmenko Marves membagi sasaran kementerian ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholder perspective* menggambarkan pencapaian tujuan, *customer perspective* menggambarkan pencapaian sasaran strategis, *internal bussines process perspective* pencapaian kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran; dan *learning and growth perspective* menggambarkan pencapaian penguatan sumberdaya dan aspek penunjang tugas lainnya.

Laporan kinerja Kemenko Marves tahun 2019 dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan strategis Kemenko Marves tahun 2020-2024, hal ini terlihat dari beberapa indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis digunakan pada pencapaian visi misi Kemenko Marves untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal ini seperti terlihat Sasaran Strategis (SS) Setmenko Marves tahun 2020-2024 seperti tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1.** Sasaran Strategis Setmenko Marves 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (000)	Satuan	TARGET					
					2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Program Dukungan Manajemen</b>										
<b>Stakeholders Perspective</b>										
SS.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Layanan Reformasi Birokrasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp 1,050,000,000	Nilai	75	78	83	87	90
<b>Customer Perspective</b>										

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (000)	Satuan	TARGET				
						2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program Dukungan Manajemen</b>										
SS.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Nilai SAKIP Kemenko Marves	Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja	Rp 15,825,577,000	Nilai	72	75	78	80	85
SS.3	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	Pengelolaan Layanan Hukum, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana	Rp 5,207,325,000	Nilai	3,2	3,5	3,8	4,1	4,5
SS.4	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Eelektronik	Indeks SPBE	Penyelenggara-an Layanan Komunikasi	Rp 3,000,000,000	Nilai	2,5	3	3,25	3,25	3,5
SS.5	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Kompeten	Indeks Profesionalitas ASN	Penyelenggara-an Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp 2,044,778,000	Nilai	71	75	80	85	90
SS.6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Opini BPK atas Laporan Keuangan		Rp 3,218,705,000	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>Internal Business Process Perspective</b>										
SS.7	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundang - Undangan yang Efektif	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan	Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja	Rp 5,987,405,000	%	100	100	100	100	100
		Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	Pengelolaan Layanan Hukum, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana	Rp 5,207,325,000	%	100	100	100	100	100
SS.8	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretaria-tan yang Prima	Persentase Sistem Layanan Kepegawai-an yang Baik	Penyelenggara-an Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp 3,681,900,000	%	80	85	90	92	95
		Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu		Rp 3,218,705,000	%	95	96	96	97	98
		Persentase Opini Publik yang Positif		Rp 4,900,000,000	%	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
		Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu		Rp 50,000,000	%	90	95	95	95	100
SS.9	Tersedianya Dokumen Penyelenggara-raan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	Penyelenggara-an Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp 7,186,738,000	Buah/paket	>5	>5	>5	>5	>5
SS.10	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampai-an Laporan Barang Milik Negara	Penyelenggara-an Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp 6,575,833,000	%	100	100	100	100	100
		Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves	Penyelenggara-an Layanan Komunikasi	Rp 3,000,000,000	%	100	100	100	100	100
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>										
SS.11	Tersedianya SDM yang Kompeten di Setmenko Marves	Persentase SDM yang Kompeten	Penyelenggara-an Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Rp 2,044,778,000	%	75	80	85	90	95
SS.12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves	Nilai PMPRB Setmenko	Pengelolaan Layanan Hukum, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana	Rp 903,720,000	Nilai	75	80	82	85	87
		Nilai SAKIP Setmenko	Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja	Rp 15,825,577,000	Nilai	70	73	76	78	80
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di	Nilai IKPA Setmenko	Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan	Rp 15,825,577,000	Nilai	95	96	96	97	98

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (000)	Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Program Dukungan Manajemen							
Setmenko Marves		dan Akuntabilitas Kinerja							

## 2.2 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan kebijakan, di tahun 2021 Setmenko Marves didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:

**Table 2. Program Setmenko Marves Tahun 2020-2024**

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	UNIT PELAKSANA
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya serta fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penyusunan arah kebijakan bidang Kemaritiman di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	100	Sekretariat Kemenko
1	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Terlaksananya Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	6	Biro Umum
2	Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja	Terselenggaranya Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Layanan Perencanaan Program dan Anggaran, Dukungan Kebijakan Strategis, Persidangan dan Akuntabilitas Kinerja	4	Biro Perencanaan
3	Pengelolaan Layanan Hukum, Kerjasama, Organisasi dan Tata Laksana	Terselenggaranya Layanan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerjasama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana	Jumlah Layanan Perancang Peraturan Perundangundangan, Layanan Advokasi dan Informasi Hukum, Layanan Pengelolaan Kerjasama, Layanan Organisasi dan Tata Laksana	4	Biro Hukum
4	Penyelenggaraan Layanan Komunikasi	Terselenggaranya Layanan Data dan Informasi, Layanan (BMN), Layanan Protokoler, Layanan	Jumlah Layanan Data dan Informasi, Layanan (BMN), Layanan Protokoler, Layanan Umum, dan Layanan Perkantoran	3	Biro Komunikasi

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	UNIT PELAKSANA
		Umum, dan Layanan Perkantoran			
5	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	Terselenggaranya Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	Jumlah Layanan Audit Internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	Inspektorat
6	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	Terselaksananya Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman	Jumlah layanan Penguatan dan Penataan Regulasi dan kelembagaan Kemaritiman	4	Staf Ahli

Sumber: Renstra Setmenko Marves 2020-2024

Secara garis besar anggaran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, harus mengacu penuh pada Renstra Kemenko Marves 2020-2024. Selanjutnya, anggaran dijabarkan lebih komprehensif setiap tahunnya guna mendukung pelaksanaan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan Rencana Kerja Setmenko Marves. Dengan demikian, diharapkan setiap program/kegiatan yang telah direncanakan telah didukung oleh anggaran yang memadai.

Program/kegiatan dimaksud dalam perencanaannya haruslah mempertimbangkan berbagai perkembangan isu dan Lingkungan strategis serta kebijakan perencanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, diantaranya 1) Perubahan pendekatan yang semula *Money Follow Function* menjadi *Money Follow Program*, 2) Pendekatan Perencanaan pembangunan nasional yang holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial, dan 3) Penajaman Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Nasional dalam RKP. Pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab Sekretariat Kemenko Marves tahun anggaran 2021 didukung dengan anggaran sebagai berikut:

**Tabel 3. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021**

UNIT KERJA	ANGGARAN
<b>Biro Perencanaan</b>	9,924,927,000
<b>Biro Hukum</b>	8,000,000,000
<b>Biro Umum</b>	120,735,825,000
<b>Biro Komunikasi</b>	26,700,000,000
<b>Inspektorat</b>	3,900,000,000
<b>Staf Ahli</b>	1,600,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>170,860,752,000</b>

## 2.3 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan perjanjian kinerja Setmenko Marves, ditetapkan target kinerja tahun 2021. Target kinerja ini terdiri dari sasaran program serta indikator kinerja tahun 2021. Adapun rincian target kinerja (sasaran program) Setmenko Marves TA. 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Rincian Target Kinerja Setmenko Marves 2021**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUN 2021
<i>Stakeholders Perspective</i>				
SS.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	80
<i>Customer Perspective</i>				
SS.2	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	2	Nilai SAKIP Kemenko Marves	80
		3	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	3.5
		4	Indeks SPBE	3
		5	Indeks Profesionalitas ASN	85
		6	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
<i>Internal Business Process Perspective</i>				
SS.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	7	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	100
SS.4	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kematriman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	8	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi	100
SS.5	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	9	Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi	100
SS.6	Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten	10	Persentase Pejabat yang sesuai Standar Kompetensi	100
SS.7	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	11	Persentase Temuan Finansial BPK	<= 2,5
		12	Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>				
SS.8	Tersedianya SDM yang Kompeten	13	Persentase SDM yang Kompeten	75
SS.9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	14	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko	80
		15	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko	80
SS.10	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko	95

## 2.4 Pengukuran Kinerja

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada. Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut:

### 1. Menghitung capaian IKU:

- a. Penghitungan capaian IKU dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan:
  - Tingkat kendali dan tingkat validitas suatu IKU, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

**Tabel 5.** Komposisi bobot IKU terhadap tingkat kendali dan tingkat validitas

Jenis IKU	Exact	Proxy	Activity
High	13.33	8.33	5.00
Moderate	15.00	10.00	6.67
Low	18.33	13.33	10.00

- Bukti hasil kinerja, dengan komposisi bobot sebagai berikut:

**Tabel 6.** Bobot bukti hasil kinerja

Kategori Penilaian	Bobot
Sesuai	100
Belum Relevan	50
Tidak Sesuai	0

- b. Menghitung persentase capaian Indikator Kinerja Utama, yaitu dengan membagi capaian berbanding targetnya

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- c. Menghitung persentase capaian final IKU, yaitu dengan mengalikan Capaian IKU dengan Data Dukung (*evidence*)

$$\text{Capaian Final IKU} = \text{Capaian IKU} \times \text{Data Dukung}$$

### 2. Menghitung capaian Sasaran Strategis

Penghitungan didapatkan dengan perkalian antara capaian final IKU dan bobot final kemudian dibagi dengan total bobot final IKU per SS yang ada targetnya

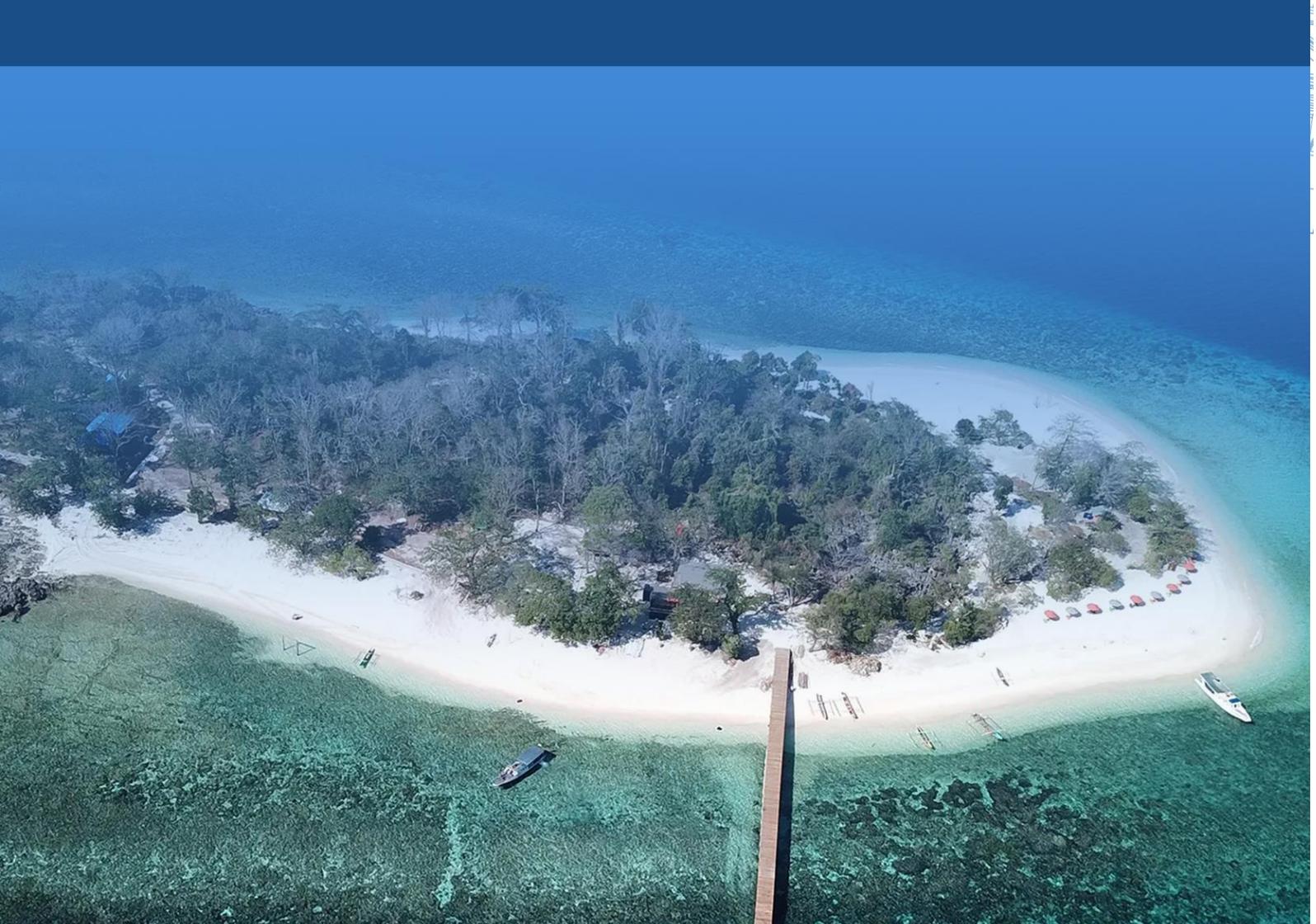
$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Capaian Final IKU} \times \text{Bobot Final IKU}}{\text{Total bobot final IKU yang ada targetnya perSS}} \times 100\%$$

3. Perspektif didapat dari hasil perkalian capaian sasaran dan bobot sasaran kemudian dibagi terhadap total bobot sasaran per perspektif

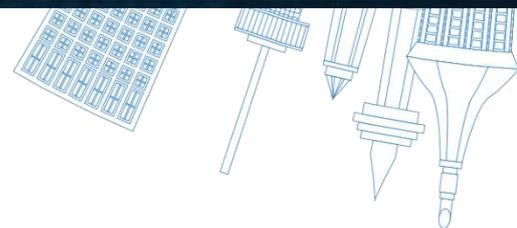
$$\text{Perspektif} = \frac{\text{Capaian Sasaran} \times \text{Bobot sasaran}}{\text{Total bobot sasaran per Perspective}} \times 100\%$$

4. Capaian Kerja Unit dihasilkan dari perkalian capaian perspektif dengan bobot perspektif yang dibagi terhadap total bobot perspektif

$$\text{Capaian kerja Unit} = \frac{\text{Capaian Perspective} \times \text{Bobot Perspective}}{\text{Total Bobot perspective}} \times 100\%$$



# AKUNTABILITAS KINERJA



### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Setmenko Marves merupakan kinerja yang merupakan kontribusi seluruh unit kerja lingkup Setmenko Marves melalui pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas ini tergambar dari capaian kinerja yang tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis yang menunjukkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan Setmenko Marves.

#### 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Target kinerja Setmenko Marves pada tahun anggaran 2021 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja Setmenko Marves Tahun 2021, terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target kinerja kinerja tersebut disusun dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal business perspective*, serta *learning and growth perspective*.

Capaian kinerja Setmenko Marves tahun 2021 adalah sebesar 97,58%. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,1% dimana kinerja Setmenko Marves pada tahun 2020 adalah sebesar 102,68%. Dari 16 IKU, jumlah IKU yang dapat mencapai target adalah sebanyak 9 IKU atau sebesar 56,25%. Sedangkan IKU yang belum mencapai target adalah sebanyak 7 IKU atau sebesar 43,75%.

IKU yang mencapai target sebagai berikut:

1. IKU 6 Opini BPK atas Laporan Keuangan sebesar 100%;
2. IKU 7 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP sebesar 100%;
3. IKU 8 Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi sebesar 100%;
4. IKU 11 Persentase Temuan Finansial BPK sebesar 120%;
5. IKU 12 Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu sebesar 100%;
6. IKU 13 Persentase SDM yang Kompeten sebesar 120%;
7. IKU 14 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko sebesar 106,25%;
8. IKU 15 Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko sebesar 102,67%;
9. IKU 16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko sebesar 100,23%.

Sedangkan IKU yang belum mencapai target yaitu:

1. IKU 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves sebesar 93,98%;
2. IKU 2 Nilai SAKIP Kemenko Marves sebesar 85,74%;
3. IKU 3 Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan sebesar 84,29%;
4. IKU 4 Indeks SPBE sebesar 93,33%;
5. IKU 5 Indeks Profesionalitas ASN sebesar 66,49%;
6. IKU 9 Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi sebesar 96%;
7. IKU 10 Persentase Pejabat yang sesuai Standar Kompetensi sebesar 92%;

Berdasarkan analisa lebih jauh, maka capaian *Stakeholders Perspective* adalah sebesar 93,98%, capaian *Customer Perspective* sebesar 85,97%, *Internal Business Process* tercapai sebesar 101,33% dan *Learning and Growth* tercapai sebesar 107,28%. Selain adanya *refocusing* anggaran, capaian kinerja Setmenko Marves juga dipengaruhi oleh kondisi dalam

dua tahun terakhir menghadapi pandemic covid 19, sehingga membuat capaian kinerja tidak optimal.

Realisasi Capaian kinerja Setmenko Marves Tahun 2021 secara keseluruhan yakni sebagai berikut:

**Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
<b>Stakeholders Perspective</b>						<b>93,98</b>
SS.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	80	75,18	93,98
<b>Customer Perspective</b>						<b>85,97</b>
SS.2	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	2	Nilai SAKIP Kemenko Marves	80	68,59	85,74
		3	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	3.50	2.95	84,29
		4	Indeks SPBE	3.00	2.80	93,33
		5	Indeks Profesionalitas ASN	85	56,52	66,49
		6	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
<b>Internal Business Process Perspective</b>						<b>101,33</b>
SS.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	7	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	100	100	100
SS.4	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kematriman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	8	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi	100	100	100
SS.5	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	9	Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi	100	96	96
SS.6	Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten	10	Persentase Pejabat yang sesuai Standar Kompetensi	100	92	92
SS.7	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi	11	Persentase Temuan Finansial BPK	≤2.50	0.56	120
		12	Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100	100
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>						<b>107,28</b>

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
SS.8	Tersedianya SDM yang Kompeten	13	Persentase SDM yang Kompeten	75	91	120
SS.9	Terwujudnya Reformasi Birokrasi	14	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko	80	85	106,25
		15	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko	75	77	102,67
SS.10	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel	16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko	95	95,22	100,23
<b>CAPAIAN</b>						<b>97,58</b>

\*) Keterangan: Capaian dihitung berdasarkan bobot sesuai IKU, SS dan Perspective

\*) Digunakan nilai capaian maksimal 120%

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

## SS.1

### Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Tujuan sasaran strategis ini adalah terlaksananya peningkatan akuntabilitas pemerintahan, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

#### IKU 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves

Indeks reformasi birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi adalah nilai penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Nilai yang digunakan dalam mengukur capaian Indikator ini adalah nilai hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan RB pada tahun sebelumnya. IKU ini, berdasarkan surat MenPANRB Nomor B/34/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 tercapai sebesar 75,18 dari target 80 atau tercapai 93,98%.

Capaian atas IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves sebesar 75,18 dari target 80 atau tercapai sebesar 93,98%. Adapun capaian atas IKU ini sebagai berikut:

**Tabel 8. Capaian Kinerja SS.1**

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Low/Exact	80	75,18	93,98%
<b>Capaian IKU</b>					<b>93,98%</b>

**\*Keterangan:** Realisasi berdasarkan Surat Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB dari Kementerian PANRB.

Persentase ini adalah nilai implementasi pengelolaan RB pada 8 agenda perubahan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu: a)Manajemen perubahan; b)Penataan peraturan perundang-undangan; c)Penataan dan penguat an organisasi; d)Penataan tatalaksana; e)Penataan sistem manajemen; f)Penguatan akuntabilitas; g)Penguatan pengawasan; dan h)Peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan Tahun 2020 serta dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024 dapat disampaikan didalam tabel berikut.

**Tabel 9.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	69.13 <sup>a</sup>	75.18 <sup>b</sup>	80	90

**Keterangan:** <sup>a</sup>hasil evaluasi RB Tahun 2019 dan <sup>b</sup>hasil evaluasi RB tahun 2020

Target Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves di tahun 2021 sebesar 80 menjadi target realistis menurut Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mencapai target tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2021 sesuai dengan realisasi rencana kerja reformasi birokrasi Kemenko Marves sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Membentuk Tim Perubahan Kemenko Marves beserta penyusunan rencana kerjanya, sosialisasi *roadmap* RB Kemenko Marves tahun 2020-2024, dan melaksanakan PMPRB.

2. Deregulasi Kebijakan

Melakukan penyusunan, identifikasi, pemetaan, analisis, dan revisi terhadap peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih/tidak harmonis/tidak sinkron bidang Kemaritiman dan Investasi.

3. Penataan Organisasi dan Tata Laksana

4. Penataan Sistem Manajemen SDM

5. Penguatan Akuntabilitas

6. Penguatan Pengawasan

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dukungan dan keterlibatan pimpinan yang konsisten serta adanya koordinasi yang baik antar Unit Kerja dalam rapat RB, Unit kerja proaktif dalam penyusunan renja dan RB, serta Unit kerja proaktif dalam penyusunan renja dan RB merupakan beberapa faktor yang mendukung tercapainya target pada IKU ini. Sementara itu, faktor pendukung lainnya yang telah dilaksanakan yakni melalui program/kegiatan FGD standar pelayanan, Rancangan Permenko tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Marves, Standar Kompetensi Jabatan SOTK 6 Deputi yang telah mendapat persetujuan KemenPANRB, serta penyusunan Peta Jabatan Pasca PB Kemenko Marves Tahun 2021.

Kondisi Pandemi Covid-19 yang sempat mengalami peningkatan mengakibatkan adanya *refocusing* anggaran pada setiap unit kerja. Dengan adanya *refocusing* anggaran, ada beberapa kegiatan inovasi yang tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi fokus utama target kinerja dapat tercapai.

Sesuai Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, secara interpretasi suatu instansi telah mendapatkan indeks Reformasi Birokrasi >80-90 telah memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja. Namun Kemenko Marves belum dapat memenuhi kriteria tersebut dikarenakan pembayaran tunjangan kinerja yang masih berbasis absen.

Indikator lainnya terkendala oleh Pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa agenda tidak telaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan bukti dukung Reformasi Birokrasi menjadi hal yang sangat penting mengingat segala capaian di 8 area perubahan Reformasi Birokrasi harus didokumentasikan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, Kemenko Marves melakukan inovasi berupa penggunaan aplikasi E-Reformasi Birokrasi (E-RB) untuk mengumpulkan bukti dukung secara elektronik di Kemenko Marves yang memudahkan pengguna. Aplikasi E-RB ini juga telah direkomendasikan oleh Kementerian PANRB untuk dijadikan *benchmarking* bagi instansi lain.

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves dari tahun 2016-2020 nilainya meningkat sebagaimana pada tabel dan masuk dalam kategori baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2020, sesuai surat MenPANRB Nomor B/34/M.RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 Kemenko Marves mendapatkan nilai indeks RB sebesar 75.18 dengan kategori BB dan berhak mengajukan penyesuaian tunjangan kinerja menjadi sebesar 80%. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Tahun 2016-2020 yakni:

**Tabel 10.** Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
2016	60.34
2017	62.82
2018	65.95
2019	69.13
2020	75.18

## SS.2

### Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima

Sasaran strategis 2 (SS.2) ini dijabarkan melalui 5 IKU sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 11.** Capaian Kinerja SS.2

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Nilai SAKIP Kemenko Marves	Moderate/Proxy	80	68.59	85.74%

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	Low/Proxy	3.5	2.95	84,29%
4.	Indeks SPBE	Moderate/Proxy	3.00	2.80	93.33%
5.	Indeks Profesionalitas ASN	Low/Proxy	85	56.52	66.49%
6.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Low/Proxy	WTP	WTP	100%
<b>Nilai Capaian SS. 2</b>					<b>85.97%</b>

## IKU 2 Nilai SAKIP Kemenko Marves

Nilai SAKIP Kemenko Marves dicapai melalui nilai hasil evaluasi KemenPANRB terhadap pelaksanaan SAKIP di Kemenko Marves atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Adapun tujuan Indikator ini adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Capaian atas IKU Nilai SAKIP Kemenko Marves tahun 2021 adalah 68,59 dari target 80 atau tercapai 85,74%. Capaian tersebut seperti di bawah ini:

**Tabel 12.** Capaian Kinerja IKU Nilai SAKIP Kemenko Marves

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Nilai SAKIP Kemenko Marves	Moderate/Proxy	80	68,59	85,74
<b>Capaian IKU</b>					<b>85,74</b>

Untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan Tahun 2020 serta dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024 dapat disampaikan didalam tabel berikut.

**Tabel 13.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Nilai SAKIP Kemenko Marves

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
2.	Nilai SAKIP Kemenko Marves	68.59 <sup>a</sup>	68.59 <sup>b</sup>	80	85

Keterangan: <sup>a</sup>Nilai SAKIP Tahun 2019 dan <sup>b</sup>Nilai SAKIP Tahun 2020

Pada bulan September 2021, Kemenko Marves telah melaksanakan evaluasi SAKIP oleh Tim Evaluator dan Penilaian SAKIP Kementerian PANRB yang dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator dan Pejabat Pimpinan Tinggi di lingkup Kemenko Marves. Evaluasi SAKIP merupakan agenda tahunan untuk melihat perkembangan implementasi SAKIP di Kemenko Marves. Pelaksanaan evaluasi berjalan cukup lancar dan tidak ditemui kendala yang berarti, hal tersebut terwujud karena kerja sama yang baik dan solid dari seluruh unit kerja di lingkup Kemenko Marves dan Tim Evaluator Kementerian PANRB. Kehadiran langsung para

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tersebut merupakan wujud keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan SAKIP di masing-masing unit kerjanya.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kemenko Marves memperoleh peringkat B yang memiliki arti bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kemenko Marves sudah mulai berjalan dengan baik namun perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut.

Berdasarkan predikat tersebut, kondisi implementasi SAKIP di lingkungan Kemenko Marves tidak terlalu signifikan berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uraian singkat hasil evaluasi oleh KemenPANRB antara lain:

1. Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Kemenko Marves, dan unit kerja Eselon I dan Unit Mandiri di lingkungan Kemenko Marves sudah ditetapkan;
2. Menko Marves, seluruh JPT Madya dan JPT Pratama di lingkungan Kemenko Marves telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
3. Kemenko Marves sudah membangun aplikasi manajemen kinerja dengan nama [sik.kemaritiman.go.id](http://sik.kemaritiman.go.id);
4. Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani SAKIP dengan pelatihan SAKIP dari unit Eselon I dan II;
5. Melakukan reviu terhadap pohon kinerja sehingga mampu mengukur kinerja lebih baik.

### **IKU 3 Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan**

Penghitungan atas indeks ini yakni berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dengan pedoman PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Berkorelasi dengan Area Penataan Peraturan Perundang-undangan, variabel penentu penilaian meliputi:

- Telah dilakukan identifikasi peraturan yang tumpang tindih;
- Telah dilakukan revisi peraturan yang tumpang tindih;
- Instansi telah mempunyai *tools* untuk perubahan peraturan; serta
- Dilakukan perbaikan secara berkesinambungan

Ekspektasi terpenuhinya nilai 3.5 menjadi target realistis dalam Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan secara spesifik yang nantinya juga menjadi nilai pengungkit atas PMPRB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Capaian atas IKU Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan tahun 2021 adalah 2,95 dari target 3,5 atau tercapai 84,29%. Capaian tersebut seperti di bawah ini:

**Tabel 14. Capaian IKU Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	Low/Proxy	3,50	2,95	84,29
<b>Capaian IKU</b>					<b>84,29</b>

Untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2020 serta dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024 dapat disampaikan didalam tabel berikut.

**Tabel 15.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
3.	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	N/A	2.95	3.5	4.5

Nilai hasil evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana Surat KemenPANRB Nomor: B/34M.RB.06/2021 pada 31 Maret 2021 tidak secara eksplisit menyebutkan capaian angka sebagaimana penilaian capaian dan target IKU pada tahun sebelumnya. Namun demikian terdapat rekomendasi untuk optimalisasi deregulasi kebijakan sebagaimana pokok substansi surat point 4b. yaitu Deregulasi Kebijakan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya melakukan pemetaan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja dan kemudahan pelayanan baik di lingkup internal maupun instansi yang di koordinir, kemudian terdapat kebijakan yang masih dalam proses penyusunan yaitu terkait dengan pengelolaan *Whistle Blowing System*.

Pemetaan Kebutuhan revisi regulasi dilakukan melalui P3MK (Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator) yang di usulkan setiap unit kerja dalam satu tahun Anggaran. Secara Internal, pemetaan revisi regulasi (Deregulasi) berdasarkan keputusan Menko Marves Nomor 32/S Tahun 2021 mencatat terdapat 5 usulan Rancangan Permenko yang merupakan revisi dari Permenko sebelumnya, artinya terdapat 30% dari P3MK yang merupakan deregulasi. Secara eksternal, optimalisasi deregulasi dilakukan melalui kontribusi Setmenko Marves dalam tim analisis dan evaluasi hukum yang di koordinasikan oleh BPHN KEMENKUMHAM, sehingga peran Kemenko Marves tidak secara langsung berimplikasi terhadap program deregulasi kebijakan.

Faktor Internal yang mendukung pencapaian IKU ini yakni adanya kepemimpinan, koordinasi, dan kerja sama tim yang baik di lingkup unit kerja eselon I maupun lintas eselon I termasuk antara Kesekretariatan dan Deputi. Pada faktor eksternal yakni adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves. *Refocusing* anggaran yang difokuskan untuk penanggulangan Covid-19 memberikan dampak cukup signifikan karena proses finalisasi yang semestinya dapat dilakukan secara tatap muka harus terkendala dan dilakukan melalui daring. Hal ini cukup menghambat para pihak yang terlibat dalam penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.

#### **IKU 4 Indeks SPBE**

Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah ukuran tingkat kematangan penerapan SPBE yang terdiri dari domain, aspek, dan indikator SPBE, yang mencakup Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviui, dan dapat dilanjutkan dengan Penilaian Visitasi berdasarkan Permenpan tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan IKU ini adalah untuk mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya serta mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Capaian atas IKU Indeks SPBE tahun 2021 adalah 2,80 dari target 3 atau tercapai 93,33%. Capaian tersebut seperti di bawah ini:

**Tabel 16.** Capaian IKU Indeks SPBE

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Indeks SPBE	Moderate/Proxy	3,00	2,80	93,33
<b>Capaian IKU</b>					93,33

Untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2020 serta dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024 dapat disampaikan didalam tabel berikut.

**Tabel 17.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Indeks SPBE

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
4.	Indeks SPBE	2.52	2.80	3.00	3.50

Ketidaktercapaian atas IKU Nilai Penyelenggaraan SPBE karena adanya perubahan dalam penilaian indikator SPBE dari KemenPANRB. Kemenko Marves saat menetapkan target pada PK Kemenko masih berpedoman pada PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sedangkan saat pelaksanaan yang digunakan dalam penilaian berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020. Sehingga mengakibatkan adanya perbedaan dalam sistem penilaian SPBE tahun 2021 dari tim assesor KemenPANRB.

Indeks SPBE 2021 diperoleh melalui penghitungan 47 (empat puluh tujuh) indikator, indikator- indikator tersebut memiliki nilai interval terendah 1 (satu) dan tertinggi bernilai 5 (lima). Beberapa langkah telah dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai indikator-indikator tersebut, antara lain:

- Dibentuk Tim Koordinator dan Tim Assesor SPBE.
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB untuk meningkatkan pemahaman mengenai indikator-indikator penilaian SPBE.
- Menyenggarakan sosialisasi kepada unit kerja di lingkungan Kemenko Marves sebagai upaya diseminasi informasi SPBE.
- Pemenuhan data dukung yang dijadikan basis penilaian pada tiap indikator.

## **IKU 5 Indeks Profesionalitas ASN**

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Hasilnya sebagai dasar penilaian dan evaluasi tindak lanjut dalam upaya pengembangan profesionalisme pegawai ASN. Dasar hukum pengukuran indeks ini adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019. Kriteria yang

digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin. Rumus pengukuran indeks profesionalitas ASN yaitu:

$$IP\ ASN = \text{Bobot Indikator} \times \text{Nilai masing – masing Jawaban Indikator}$$

Proses pelaksanaan indeks profesionalitas ASN Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi TA 2019 memperoleh nilai capaian sebesar 82. Tahun 2021, Setmenko Marves menargetkan capaian Indeks Profesionalitas ASN sebesar 85 pada tahun 2021. Nilai yang akan keluar pada tahun 2021 merupakan penilaian dari tahun 2020.

Capaian atas IKU Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 adalah 56,52 dari target 85 atau tercapai 66,49%. Capaian tersebut seperti di bawah ini:

**Tabel 18.** Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Indeks Profesionalitas ASN	Low/Proxy	85	56,52	66,49
<b>Capaian IKU</b>					<b>66,49</b>

Untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2020 serta dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024 dapat disampaikan didalam tabel berikut.

**Tabel 19.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Indeks Profesionalitas ASN

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
5.	Indeks Profesionalitas ASN	N/A	56.52	85	90

Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021 Kemenko Marves berdasarkan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor: sebesar 870/B-BM.02.01/SD/C/2022 tanggal 13 Januari 2022 adalah sebesar 56,52 dari target 85 atau tercapai 66,49%. Capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan dialami hampir semua K/L dan pemda. Karena Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN pada umumnya tidak terselenggara. Tidak terselenggaranya Diklat bagi ASN Kemenko Marves disebabkan oleh: 1) kondisi pandemi covid 19; 2) anggaran pengelolaan SDM sangat minim; 3) lembaga pembina tidak melaksanakan fasilitasi diklat untuk data baru hanya menjalankan untuk data yang sudah mendaftar setahun sebelumnya; 4) Kemenko Marves memfokuskan kepada pengadaan pegawai karena kekosongan jabatan pimpinan tinggi dan kekurangan staf PNS pada semua unit kerja akibat reorganisasi. Namun demikian, Kemenko Marves merupakan 3 (tiga) terbaik kategori K/L dalam pencapaian IP ASN setelah Kementerian PPN/Bappenas (74,57) dan Kementerian Kelautan Perikanan (58,42).

Sepanjang Tahun 2021, Setmenko Marves telah melakukan inventarisir data yang dibutuhkan dan diunggah ke dalam aplikasi SAPK BKN untuk dapat dinilai pada akhir tahun 2021 oleh BKN. Selain itu Kemenko Marves sampai tahun 2021 mendapat penghargaan BKN

Award 2021 atas capaian dalam perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun dari BKN, yang diberikan pada bulan Juni 2021. Setmenko Marves terus memaksimalkan pengumpulan SKP seluruh pegawai dengan cara berkoordinasi dengan bagian TU di masing-masing unit kerja, pengiriman pegawai untuk mengikuti kegiatan diklat, dan pengembangan kompetensi lainnya serta mengintegrasikan kinerja pegawai melalui eSKP bekerjasama dengan unit kerja di lingkup Setmenko Marves.



Berdasarkan informasi dari kegiatan *Focus Group Discussion* BKN, hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 secara nasional dikategorikan sangat rendah. Dari keempat dimensi penilaian Indeks Profesionalitas ASN, dimensi kompetensi memiliki bobot nilai paling besar dan punya pengaruh signifikan sehingga jika nilai dimensi ini rendah akan mempengaruhi hasil akhir. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan fungsional

menjadi syarat/kewajiban seorang PNS dalam menduduki jabatan struktural ataupun fungsional.

Dari total 36 PNS yang telah dilantik menjadi pejabat fungsional, sejumlah 7 PNS belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional. Sementara itu dari total 192 pejabat struktural, hanya 55 PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai jenjang jabatan tahun 2020. Salah satu faktor penyebab belum maksimalnya pengembangan kompetensi pegawai guna memenuhi dimensi kompetensi yaitu keterbatasan anggaran. Sampai saat ini, Setmenko Marves telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2020 melalui *input* dan *updating* data pada SAPK BKN dan sudah melakukan rekonsiliasi data dengan menyampaikan data pengembangan kompetensi dalam kurun waktu tahun 2020 kepada Direktorat Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, BKN belum merilis laporan indeks profesionalitas ASN tersebut.

## **IKU 6 Opini BPK atas Laporan Keuangan**

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kemenko Marves yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Tahun 2021, Kemenko Marves menargetkan kembali untuk meraih hasil pemeriksaan dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Capaian atas IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2021 adalah WTP dari target WTP atau tercapai 100%. Capaian tersebut seperti di bawah ini:

**Tabel 20. Capaian IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan**

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Low/Proxy	WTP	WTP	100
<b>Capaian IKU</b>					100

Untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan Tahun 2020 serta dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024 dapat disampaikan didalam tabel berikut.

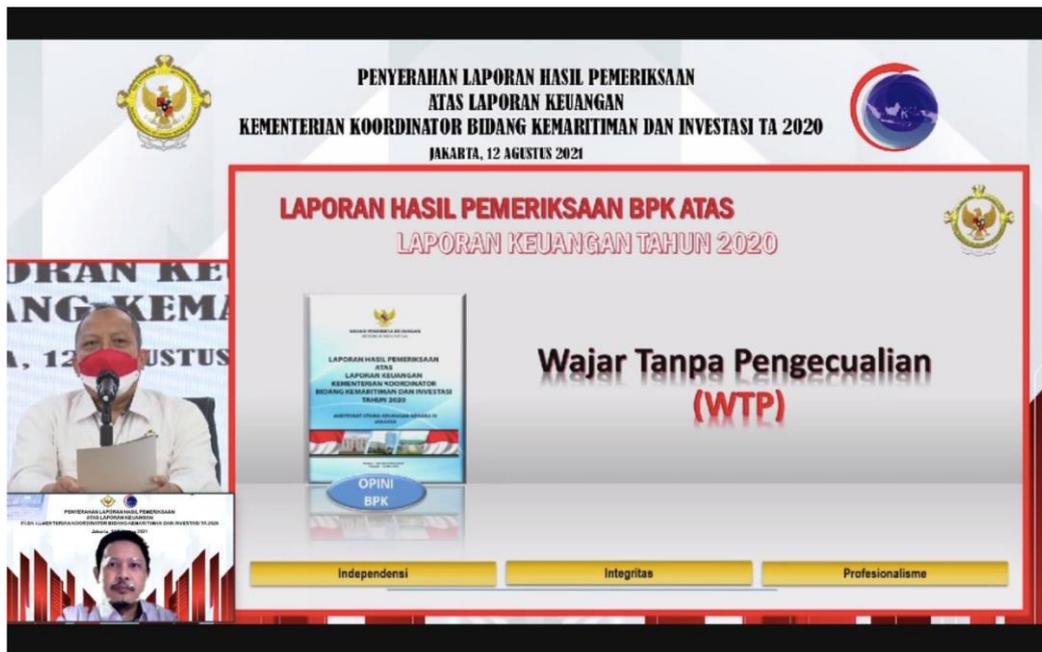
**Tabel 21. Perbandingan Capaian dan Target IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan**

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
6.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP

Di Tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menargetkan kembali untuk meraih hasil pemeriksaan dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Pada Triwulan I, BPK melaksanakan *entry meeting* atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKLL) Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan secara virtual. Pemeriksaan berlangsung selama 90 hari dilaksanakan dengan mengutamakan prosedur pemeriksaan secara *virtual*. BPK sudah menyampaikan daftar temuan hasil pemeriksaan sementara dari data permintaan berkas 2020 yang dilakukan secara bertahap. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah melakukan pembahasan secara internal dan menindaklanjuti hasil temuan BPK berupa tanggapan tertulis atas konsep temuan BPK. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pun menyiapkan *draft action plan* terkait rencana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam mengatasi hasil temuan BPK tahun 2020.

Pada Semester I, beberapa temuan sudah ditindaklanjuti dan BPK juga memantau pelaksanaan dari *action plan* yang telah dibuat oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 milik Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperoleh hasil WTP. Ini merupakan pencapaian WTP ke lima kali secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Pada tanggal 12 Agustus 2021, telah dilakukan serah terima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara virtual oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara IV BPK yang diterima oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berdasarkan hasil pemantauan, diperoleh data bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengalami peningkatan dari semester sebelumnya. Tim BPK telah melakukan penelaahan atas bukti tindak lanjut yang telah selesai yaitu (status 1 dan 4) pada semester II tahun 2020 sebesar 90,71% atau telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 127 rekomendasi dari total 140 rekomendasi. Hal tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan tindak lanjut yang telah selesai pada Semester I tahun 2020 yakni sebesar 82,86%.



Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Kemenko Marves dalam rangka meraih opini Laporan Keuangan WTP antara lain: (1) Penguatan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan Keuangan, (2) Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, (3) Menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis, dan (4) melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis. Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan oleh Kemenko Marves dalam rangka pencapaian IKU ini terutama terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) antara lain:

1. Penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kemenko Marves Tahun 2020 dilengkapi dengan bukti-bukti pendukungnya.
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing unit kerja eselon I serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.
4. Meningkatkan peran aktif Inspektorat dan satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) Kemenko Marves.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berturut-turut setiap tahun mendapatkan opini WTP dari BPK. Opini WTP ini dapat tercapai karena kerja keras dan kerjasama yang dilakukan oleh setiap unit kerja untuk melaksanakan realisasi anggaran dan pelaksanaan keuangan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kedepan, Kemenko Marves akan terus mempertahankan opini WTP dari BPK dengan melakukan pengelolaan keuangan yang tertib, dan akuntabel.

## SS.3

### Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (Satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP.

#### IKU 7 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan ditetapkannya IKU ini yakni untuk mengukur sejauh mana penerapan SAKIP di Unit Kerja Eselon I. Formula penghitungan terhadap capaian IKU ini yakni:

$$\frac{\text{Jumlah pemenuhan target dokumen SAKIP yang harus diunggah di e – SAKIP}}{\text{Target dokumen SAKIP yang harus diunggah di e – SAKIP}} \times 100\%$$

Capaian atas IKU Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP adalah 100 dari target 100 atau tercapai 100%. Capaian tersebut seperti di bawah ini:

**Tabel 22.** Capaian Kinerja SS.3

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
7	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	Moderate/Exact	100	100	100
<b>Capaian IKU</b>					100

Dalam mencapai target IKU ini, Setmenko Marves telah melaksanakan kegiatan *entry meeting* penilaian SAKIP bersama dengan seluruh unit kerja lingkup Kemenko Marves. Sebagai perbandingan atas capaian IKU tahun 2021 dan tahun 2020 serta target akhir Renstra Setmenko tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 23.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
7.	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	N/A	100	100	N/A

Nilai capaian pada IKU Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian tahun 2020 maupun dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024. Hal ini disebabkan IKU ini baru ditargetkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021. Tahun 2020, terdapat IKU Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai

dengan Ketentuan, yang terdiri dari dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan DIPA dari masing-masing unit Eselon I dan Eselon II. Target yang ditetapkan pada tahun 2020 dan Renstra 2024 dalam pencapaian IKU Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang sesuai dengan Ketentuan yakni 100.

## SS.4

### Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemartiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis

Peraturan Perundang-undangan dan harmonis yang efektif adalah peraturan perundang-undangan yang penyusunannya terkoordinasi dengan baik dan telah dilakukan harmonisasi. Hal ini merupakan salah satu tujuan dari agenda penataan peraturan perundang-undangan dalam program reformasi birokrasi, sehingga kemudian dijadikan salah satu Sasaran strategis (SS.4) yang dijabarkan oleh 1 IKU.

#### IKU 8 Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi

Tujuan dari IKU ini adalah optimalisasi pencapaian target penyelesaian rancangan Permenko sebesar 100% sebagaimana Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2021. Persentase peraturan perundang-undangan di lingkungan Kemenko Marves yang diharmonisasi/difinalisasi adalah Jumlah Peraturan Menteri Koordinator yang telah selesai diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Permenko yang diundangkan dengan Berita Negara) dan/atau telah difinalisasi oleh Biro Hukum Kemenko Marves (Permenko yang tidak perlu diundangkan dengan Berita Negara) berdasarkan jumlah rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang diajukan oleh setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam SK P3MK dalam satu tahun anggaran.

Adapun formulasi dari IKU 8 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah RPermenko yang selesai diharmonisasi}}{\text{Jumlah RPermenko yang ditetapkan dalam SK P3MK}} \times 100\%$$

Capaian atas IKU Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi adalah 100 dari target 100 atau tercapai 100%. Capaian tersebut seperti di bawah ini:

**Tabel 24. Capaian Kinerja SS.4**

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
8	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi	Moderate/Exact	100	100	100
<b>Capaian IKU</b>					100

Untuk perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2020 serta dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024 dapat disampaikan didalam tabel berikut.

**Tabel 25.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
8.	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi	6.6%	100%	100%	100%

Tahun 2021 Setmenko Marves telah mengharmonisasikan 8 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi dari target 15 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 32/S Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Tahun 2021.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian target pada IKU ini diantaranya pada faktor internal yakni adanya kepemimpinan, koordinasi, dan kerja sama tim yang baik di lingkup unit kerja eselon I maupun lintas eselon I. Faktor eksternal yang mempengaruhi yakni adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antar Kementerian/Lembaga baik yang berada di bawah koordinasi Kemenko Marves atau yang tidak berada di bawah koordinasi Kemenko Marves. Sebagai contoh, pergantian tim harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM membawa pengaruh cukup signifikan karena adaptasi yang lancar. Sedangkan faktor pendukung lainnya keberadaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 32/S Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Tahun 2021 membawa pengaruh cukup penting karena menjadi acuan dalam menyusun Peraturan Menteri Koordinator.

*Refocusing* anggaran yang difokuskan untuk penanggulangan Covid-19 memberikan dampak cukup signifikan karena proses finalisasi yang semestinya dapat dilakukan secara tatap muka harus terkendala dan dilakukan melalui daring. Hal ini cukup menghambat para pihak yang terlibat dalam penyusunan Peraturan Menteri Koordinator. Namun, koordinasi SDM lingkup Setmenko Marves yang baik mendukung tercapainya target kinerja sesuai tempo waktu yang telah ditentukan. Di tengah keterbatasan selama PPKM pada Juni-September 2021 pun, Setmenko Marves mampu menyelenggarakan finalisasi dengan menggunakan inovasi teknologi seperti *Zoom*, *Google Form*, dan *website* JDIIH Marves untuk melakukan monitoring terhadap kinerja.

Beberapa dokumentasi dan data dukung dalam pencapaian target IKU ini diantaranya:

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi:

<https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permenko/2021/2021pmmarves001.pdf>

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permenko/2021/2021pmmarves002.pdf>
- Peraturan Menteri Koordinator tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi: <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permenko/2021/2021pmmarves003.pdf>

## SS.5

### Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik

Sasaran Startegis 5 (SS.5) ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya berbasis elektronik yang terpadu. SS.5 didukung oleh 1 (Satu) indikator kinerja.

#### IKU 9 Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi

IKU Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi adalah tercapainya target tingkat layanan sistem informasi yang dijanjikan oleh Bagian Data dan Sistem Informasi sebagai penyedia layanan sistem informasi kepada unit kerja di Lingkup Kemenko Marves sebagai pengguna layanan sistem informasi di Lingkup Kemenko Marves. Indikator ini juga menjadi jaminan terhadap ketersediaan (*availability*) layanan sistem informasi dalam waktu 1 tahun. Tingkat ketersediaan layanan sistem informasi ini mengacu pada *Data Center Uptime Service Level Agreement* yang meliputi aspek ketersediaan sumber kelistrikan, pendinginan ruang server, dan konektivitas jaringan. Formulasi dari IKU ini adalah:

$$\frac{\text{Persentase SLA (Service Level Agreement) layanan sistem informasi yang terpenuhi}}{\text{Target SLA}} \times 100\%$$

Capaian atas IKU Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi tahun 2021 adalah 96 dari target 100 atau tercapai 96%. Capaian tersebut seperti di bawah ini:

**Tabel 26. Capaian Kinerja SS.5**

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi	Moderate/Proxy	100	96	96%
<b>Capaian IKU</b>					<b>96%</b>

Perbandingan capaian tahun 2021 dan 2020 serta target tahun 2021 dan target akhir Renstra tahun 2024 seperti terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 27. Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi**

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
9.	Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi	N/A	96	100	N/A

Nilai capaian pada IKU Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian tahun 2020 maupun dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024. Hal ini disebabkan oleh IKU ini baru ditargetkan pada Perjajian Kinerja 2021. Beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai IKU ini yakni dengan mendongkrak indeks SPBE melalui langkah sebagai berikut:

1. Pembentukan SK Koordinator dan SK Tim assesor SPBE;
2. Penyusunan kebijakan tata Kelola SPBE (dalam proses *drafting*);
3. Pembuatan Surat Edaran Sesmenko terkait kebijakan tata Kelola SPBE;
4. Pemenuhan seluruh *evidence* terkait 47 indikator SPBE, antara lain video yang berisi komitmen Menko Marves dan Sesmenko dalam melaksanakan SPBE di lingkup kemenko Karves, serta video produk unggulan terkait layanan administrasi berbasis digital yaitu marvescore, marves HR, JDIH, PPID, layanan e Laporan, dan marves dalam angka (MDA) berbasis *dashboard website* berisi informasi untuk mendukung Kedeputian terkait informasi 7 (tujuh) K/L dibawah Kemenko Marves.

Dalam rangka peningkatan layanan administrasi berbasis aplikasi, telah dilakukan pula percepatan target interoperabilitas antar aplikasi, yaitu melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu aplikasi umum: KRISNA, SAKTI, e-SKP dan MySAPK, SAKIP serta SRIKANDI, yaitu Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan-Bappenas, Direktorat Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran-Kementerian Keuangan, Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN-BKN, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III-Kemen PAN RB serta Pusat Data dan Informasi-ANRI.

## SS.6

### Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten

Sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang sangat penting dari proses dan tujuan dalam pencapaian kinerja Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kemenko Marves sangat memerlukan dukungan SDM yang profesional dan kompeten yang berkualitas guna memenuhi tugas dan fungsinya. Sekretariat Kemenko Marves terus berupaya menyediakan SDM yang professional untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas lingkup Kemenko Marves. Sasaran strategis 6 (SS.6) ini dijabarkan melalui 1 IKU.

## IKU 10 Persentase Pejabat yang sesuai Standar Kompetensi

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengetahui persentase pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi serta memastikan tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten. Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Komponen data dukung yang dinilai dalam pelaksanaan sumber daya manusia yang kompeten antara lain standar kompetensi manajerial (integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan) dan standar kompetensi sosio kultural (perekat bangsa). Sedangkan formulasi dari IKU ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pejabat yang sesuai kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh pejabat}} \times 100\%$$

Capaian atas IKU Persentase Pejabat yang sesuai Standar Kompetensi adalah 92 dari target 100 atau tercapai 92%, Adapun capaian IKU seperti tabel di bawah ini:

**Tabel 28.** Capaian Kinerja SS.6

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
10.	Persentase Pejabat yang sesuai Standar Kompetensi	High/Proxy	100	92	92%
Capaian IKU					92%

Nilai capaian pada IKU Persentase Pejabat yang sesuai Standar Kompetensi tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian tahun 2020 maupun dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024. Hal ini disebabkan oleh IKU ini baru ditargetkan pada Perjajian Kinerja 2021.

**Tabel 29.** Perbandingan Capaian dan Target IKU 10

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
10.	Persentase Pejabat yang sesuai Standar Kompetensi	N/A	92%	100	N/A

Persentase pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas yang berkompeten dalam menduduki jabatan pada tahun 2021 adalah sebesar 92% atau sebanyak 174 pegawai dari total 189 pejabat yang telah mengikuti *assessment*. Rincian per unit kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 30. Pejabat yang Sesuai Standar Kompetensi Tahun 2021**

No	Unit Kerja Eselon	Total Pejabat	Persentase
1	Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Dan Energi	18	89%
2	Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	23	95,8%
3	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dan Transportasi	19	86,4%
4	Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Dan Kehutanan	21	87,5%
5	Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	18	90%
6	Deputi Bidang Koordinasi Investasi Dan Pertambangan	24	100%
8	Sekretariat Kementerian Koordinator	48	96%
9	Inspektorat	3	75%
	<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>92%</b>

Sumber: Biro Umum, 2021

## SS.7

### Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Sasaran Startegis 7 (SS.7) ini menggunakan 2 IKU sebagai indikator capaian kinerja yang memiliki realisasi pada tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 31. Capaian Kinerja SS.7**

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
11.	Persentase Temuan Finansial BPK	High/Proxy	<= 2.5	0.56	120
12.	Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu	High/Proxy	100	100	100
<b>Nilai Capaian SS. 7</b>					<b>110</b>

#### IKU 11 Persentase Temuan Finansial BPK

Batas tertinggi nilai temuan pengawas eksternal (BPK RI) dari total realisasi anggaran Kemenko Marves Tahun 2020 adalah jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi Kemenko Marves atas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2021 dibandingkan

dengan realisasi anggaran Kemenko Marves tahun 2020. Sehubungan dengan realisasi IKU ini menggunakan data hasil pemeriksaan BPK RI, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi *Minimize* (semakin kecil lebih baik).

Pengukuran kinerja IKU ini dilakukan secara tahunan pada triwulan II setelah hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Marves Tahun 2020 terbit. Capaian atas IKU Persentase Temuan Finansial BPK tahun 2021 adalah 0,56 dari target  $\leq 2,5$  atau tercapai 120%. Capaian tersebut seperti di bawah ini:

**Tabel 32.** Capaian IKU Persentase Temuan Finansial BPK Tahun 2021

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
11	Persentase Temuan Finansial BPK	High/Proxy	$\leq 2.5$	0.56	120
<b>Capaian IKU</b>					<b>120</b>

Adapun perbandingan dengan capaian tahun 2021 dan tahun 2020 maupun membandingkan dengan target capaian di tahun akhir Renstra yakni 2024.

**Tabel 33.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Temuan Finansial BPK

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
11.	Persentase Temuan Finansial BPK	N/A	0.56	$\leq 2.5$	N/A

Perbandingan capaian antara tahun 2021 dan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan karena pada Renstra Setmenko periode tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja tahun 2020, IKU 11 yaitu Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan BMN. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami perubahan IKU pada perjanjian kinerja menjadi Persentase Temuan Finansial BPK. Perubahan nomenklatur mempertimbangkan bahwa parameter IKU menyesuaikan dengan pencapaian kinerja yaitu memisahkan antara kinerja pengelolaan keuangan dengan kinerja BMN.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK diketahui bahwa Nilai temuan pada LHP BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Marves adalah sebesar Rp Rp1.334.326.379,74 atau 0,54% dari realisasi Rp245.103.180.674,00. Dengan demikian Batas Tertinggi Nilai Temuan pada LHP BPK atas LK Kemenko Marves terealisasi sebesar 0,54% dari target  $\leq 2,5\%$  atau tercapai sebesar 459,23%, dalam pencapaian IKU digunakan nilai capaian maksimal penilaian sebesar 120%. Perkembangan capaian nilai temuan materialitas pengawas eksternal pada Kemenko Marves dari tahun ke tahun disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 34.** Hasil Pengolahan atas Hasil Pengawasan BPK terhadap LK Kemenko Marves

Target 2021 (%)	Realisasi Temuan pada LHP BPK atas LK (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
$\leq 2,5$	N/A	N/A	N/A	0,55 %	0,54 %

Faktor pendukung dalam mencapai nilai indikator ini yakni telah dilaksanakan sosialisasi perhitungan uang harian perjalanan dinas luar negeri serta menjadikan rekomendasi BPK di tahun sebelumnya sebagai dasar perhitungan uang harian perjalanan dinas luar negeri tahun berjalan sebelum diterbitkan aturan internal mengenai perhitungan uang harian perjalanan dinas luar negeri. Sementara faktor penghambat pencapaian nilai indikator yakni berkaitan dengan penatausahaan dan perencanaan yang belum memadai, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang belum didukung dengan sistem yang memadai.

*Refocusing* anggaran yang dilakukan untuk menangani Covid-19 memberikan dampak cukup signifikan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini. Namun, koordinasi SDM lingkup Setmenko Marves yang baik mendukung tercapainya target kinerja sesuai tempo waktu yang telah ditentukan.

### IKU 12 Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu

Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya pada perundang-undangan.

Capaian atas IKU Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu tahun 2021 adalah 100 dari target 100 atau tercapai 100%. Capaian tersebut seperti di bawah ini:

**Tabel 35.** Capaian IKU Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu Tahun 2021

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
12	Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu	High/Proxy	100	100	100
<b>Capaian IKU</b>					<b>100</b>

Waktu penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016. Laporan keuangan *unaudited* disampaikan paling lambat pada tanggal terakhir bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan tahunan asersi final akan ditentukan waktunya sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

**Tabel 36.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu

No	Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Tahun 2021	Target Tahun 2024
12.	Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu	N/A	100	100	N/A

Penjelasan atas IKU ini sama halnya dengan IKU 11 di atas, bahwa Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian tahun 2020 maupun membandingkan dengan target capaian di tahun akhir Renstra yakni 2024.

Indikator yang tercantum di dalam perjanjian kinerja Tahun 2020 serta Renstra 2020-2024 yakni Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan BMN yang memiliki target capaian IKU 100. Perubahan nomenklatur IKU ini mempertimbangkan bahwa parameter IKU menyesuaikan dengan pencapaian kinerja yaitu memisahkan antara kinerja pengelolaan keuangan dengan kinerja BMN.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi setiap tahunnya selalu mencoba untuk mempertahankan prestasi terkait pemenuhan laporan keuangan. Kemenko Marves tahun 2021 juga menyerahkan Laporan Keuangan tepat waktu sehingga kami konsisten dalam mempertahankan prestasi yang telah kami lakukan di tahun - tahun sebelumnya. Kedepannya Kemenko Marves juga akan terus berusaha untuk mempertahankan prestasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Sepanjang tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah menyampaikan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2020 *Unaudited* maupun *Audited* kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Direktur Akutansi dan Pelaporan Keuangan, yang tertuang dalam Surat Kepala Biro Umum Nomor B-0089/SESMENKO.03/MARVES/KP.03.02 tanggal 19 Februari 2021 dan Surat Kepala Biro Umum Nomor B-0184/SESMENKO.03/MARVES/KU.03.02/V/2021 Tanggal 5 Mei 2021 perihal penyampaian laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2020 *Audited*. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga telah menyampaikan laporan keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 yang tertuang dalam Surat Kepala Biro Umum Nomor B-0360/SESMENKO.03/MARVES/KU.04/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

Faktor Internal yang mendukung pencapaian penyerahan LK tepat pada waktunya salah satunya adalah SDM yang membuat LK memiliki latar belakang yang mendukung yaitu akuntansi. Sehingga, dengan pengetahuan yang dimiliki oleh SDM yang tersedia, penyelesaian pembuatan LK dapat diselesaikan dengan tepat waktu Faktor Eksternal yang mendukung tercapainya penyerahan LK tepat waktu adalah terdapat koordinasi yang baik dengan pihak yang membantu Kemenko Marves dalam membuat LK. Dit. APK yang membantu Kemenko Marves juga cepat tanggap serta solutif terhadap masalah - masalah keuangan yang terjadi di Kemenko Marves.

Target kesesuaian dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga dapat tercapai karena adanya dukungan sumber daya berupa anggaran. Anggaran yang telah ditetapkan sangat berpengaruh penting dalam pencapaian target sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar. Kedepannya pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan ini akan terus dilakukan peningkatan baik berupa koordinasi yang lebih maksimal antar anggota dan peningkatan ilmu pengetahuan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara baik, cepat, dan tepat.

## SS.8

### Tersedianya SDM yang Kompeten

Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (Satu) Indikator Kinerja Persentase SDM yang Kompeten. Persentase seluruh SDM Kemenko Marves yang memiliki kompetensi (manajerial dan sosiokultural) yang sesuai dan menunjang dengan jabatan yang diampu, penilaiannya mengacu ke permenpan 38/2017 tentang standar kompetensi jabatan.

#### IKU 13 Persentase SDM yang Kompeten

Tujuan dari IKU ini yaitu untuk mengetahui persentase pegawai yang telah mengikuti pengembangan kompetensi serta memastikan tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten.

Pengembangan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran dan lain sebagainya. Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa pengembangan kompetensi adalah hak seorang PNS. Adapun formula dari IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SDM Kemenko Marves yang sesuai kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh SDM Kemenko Marves}} \times 100\%$$

Capaian IKU presentase SDM yang kompeten sebesar 91 dari target yaitu 75 atau tercapai 120%. Capaian IKU 13 seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 37. Capaian Kinerja SS.8**

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
13.	Persentase SDM yang Kompeten	High/Proxy	75	91	120
<b>Capaian IKU</b>					<b>120</b>

Adapun perbandingan atas capaian IKU Persentase SDM yang Kompeten tahun 2021 dan tahun 2020 serta target tahun 2021 dan target akhir Renstra tahun 2024 sebagai berikut.

**Tabel 38. Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase SDM yang Kompeten**

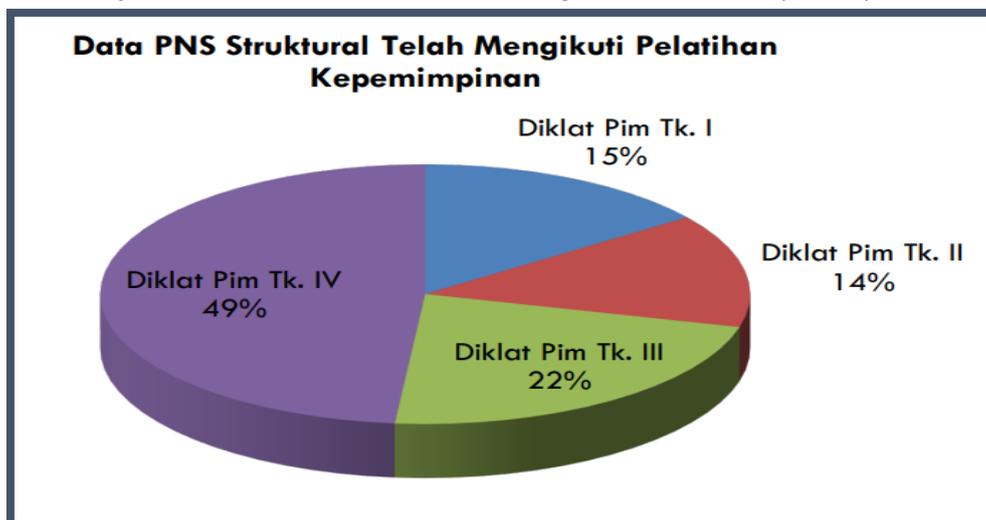
No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
13.	Persentase SDM yang Kompeten	N/A	91	75	N/A

Persentase sumber daya manusia yang telah mengikuti pengembangan kompetensi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Triwulan IV adalah 91%. Berdasarkan data Triwulan IV, diperoleh hasil sejumlah 381 pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas dan pejabat fungsional serta staf pelaksana telah mengikuti pengembangan kompetensi yang terdiri dari

pemberian tugas/izin belajar, pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan teknis, seminar, workshop, bimbingan teknis serta sosialisasi.

Pencapaian ini tentunya tidak luput dari faktor pendukung selama pelaksanaan pengembangan kompetensi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Faktor pendukung di antaranya adalah koordinasi yang baik antar unit kerja dalam menyampaikan informasi program pengembangan kompetensi dari Instansi luar dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi oleh Biro Umum. Kemudian, kendala yang dialami adalah pengaruh dari keterbatasan anggaran sehingga pegawai belum dapat mengikuti pelatihan yang sesuai dengan jabatannya seperti pelatihan kepemimpinan dan pelatihan fungsional. Inovasi yang difasilitasi oleh Biro Umum adalah pelaksanaan rutin Sharing Session dengan menghadirkan narasumber baik dari Internal Kemenko Marves seperti para staf ahli Menteri Koordinator dan dari Eksternal. Sementara itu, berikut rincian pengembangan kompetensi SDM sebagai berikut :

**Grafik 1.** Data PNS Struktural Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan



**Tabel 39.** Data PNS Fungsional Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No	Jabatan Fungsional	Jumlah yang telah Mengikuti
1	Analisis Kepegawaian	3
2	Arsiparis	3
3	Auditor	12
4	Pranata Humas	1
5	Pranata Komputer	2
6	Analisis Kebijakan	9
7	Pengadaan Barang dan Jasa	2
8	Perencana	4
9	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	2

**Grafik 2. Data PNS Mengikuti Pelatihan Klasikal**



## SS.9 Terwujudnya Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis ini didukung oleh 2 (Dua) Indikator Kinerja, dengan capaian pada periode tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 40. Capaian Kinerja SS.9**

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
14.	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko	High/Proxy	80	85	106.25%
15.	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko	Moderate/Proxy	75	77	102.67%
<b>Nilai Capaian SS. 9</b>					<b>104.46%</b>

### IKU 14 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko

Nilai tersebut diambil dari hasil penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Setmenko Marves. Penilaian tersebut dilakukan oleh Inspektorat terhadap implementasi RB Eselon I (Setmenko).

Capaian atas IKU Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko adalah 85 dari target sebesar 80 atau tercapai 103,13%. Penilaian tersebut berpedoman pada Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Adapun capaian atas IKU ini sebagai berikut.

**Tabel 41.** Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko Tahun 2021

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
14.	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko	High/Proxy	80	85	106.25%
<b>Capaian IKU</b>					<b>106.25%</b>

Perbandingan capaian tahun 2021 dan tahun 2021 serta target tahun 2021 dan target akhir Renstra tahun 2024 seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 42.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
14.	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko	69.13	85	80	100

Dalam rangka mencapai target tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2021 sesuai dengan realisasi rencana kerja reformasi birokrasi Kemenko Marves sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
  - Membentuk Tim Perubahan Kemenko Marves beserta penyusunan rencana kerjanya, sosialisasi *roadmap* RB Kemenko Marves tahun 2020-2024, dan melaksanakan PMPRB.
2. Deregulasi Kebijakan
  - Melakukan penyusunan, identifikasi, pemetaan, analisis, dan revisi terhadap peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih/tidak harmonis/tidak sinkron bidang Kemaritiman dan Investasi.
3. Penataan Organisasi dan Tata Laksana
4. Penataan Sistem Manajemen SDM
5. Penguatan Akuntabilitas
6. Penguatan Pengawasan
7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi faktor penting bagi keberhasilan Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja eselon I di Kemenko Marves. Setmenko Marves sebagai *leading sector* pengelolaan RB di Kemenko Marves juga telah optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan koordinasi Reformasi Birokrasi di Kemenko Marves.

Sesuai Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, secara interpretasi suatu instansi telah mendapatkan indeks Reformasi Birokrasi >80-90 telah memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja. Namun Kemenko Marves belum dapat memenuhi kriteria tersebut dikarenakan pembayaran tunjangan kinerja yang masih berbasis absen. Indikator lainnya terkendala oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa agenda tidak telaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pengelolaan bukti dukung Reformasi Birokrasi menjadi hal yang sangat penting mengingat segala capaian di 8 area perubahan Reformasi Birokrasi harus didokumentasikan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, Kemenko Marves melakukan inovasi berupa penggunaan aplikasi E-Reformasi Birokrasi (E-RB) untuk mengumpulkan bukti dukung secara elektronik di Kemenko Marves yang memudahkan pengguna. Aplikasi E-RB ini juga telah direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB untuk dijadikan *benchmarking* bagi instansi lain.

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves dari tahun 2016-2019 nilainya selalu meningkat, selain itu pemenuhan rekomendasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Marves oleh Kementerian PAN dan RB dapat dipenuhi oleh Kemenko Marves. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Tahun 2016-2020 yakni:

**Tabel 43.** Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves Tahun 2016-2020

Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
2016	60.34
2017	62.82
2018	65.95
2019	69.13
2020	75.18

### **IKU 15 Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko**

Nilai Evaluasi SAKIP adalah Nilai Evaluasi atas implementasi SAKIP yang dikeluarkan Inspektorat Kemenko Marves atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Tujuan dari IKU ini yakni untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan melakukan monitor atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Capaian atas IKU Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko Tahun 2021 sebesar 77 dari target 75 atau tercapai 102, 67%. Capaian dimaksud sebagai berikut.

**Tabel 44.** Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko Tahun 2021

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
15.	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko	Moderate/Proxy	75	77	102.67%
<b>Capaian IKU</b>					<b>102.67%</b>

Untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan Tahun 2020 serta dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024 dapat disampaikan didalam tabel berikut.

**Tabel 45.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
15.	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko	N/A	77	75	80

## SS.10

### Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel

Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (Satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko.

#### IKU 16 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu menjamin ketercapaian keluaran berupa kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penilaian IKPA terdiri dari 13 indikator yaitu penyerapan anggaran, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, LPJ Bendahara, renkas, kesalahan SPM, retur SP2D, pagu minus, dispensasi serta konfirmasi capaian *output*. Adapun formulasi dari IKU ini adalah :

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n)$$

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN	
1. Penyerapan Anggaran	7. Deviasi Halaman III DIPA
2. Data Kontrak	8. LPJ Bendahara
3. Penyelesaian Tagihan	9. Renkas
4. Konfirmasi Capaian Output	10. Kesalahan SPM
5. Pengelolaan UP dan TUP	11. Retur SP2D
6. Revisi DIPA	12. Pagu Minus
	13. Dispensasi

Capaian atas IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko tahun 2021 sebesar 95,62 dari target 95 atau tercapai 100,65%

**Tabel 46.** Capaian Kinerja SS.10

No	Nama IKU	Tingkat Kendali/Tingkat Validasi IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)
16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko	Moderate/Proxy	95	95.62	100.65%
<b>Capaian IKU</b>					<b>100.65%</b>

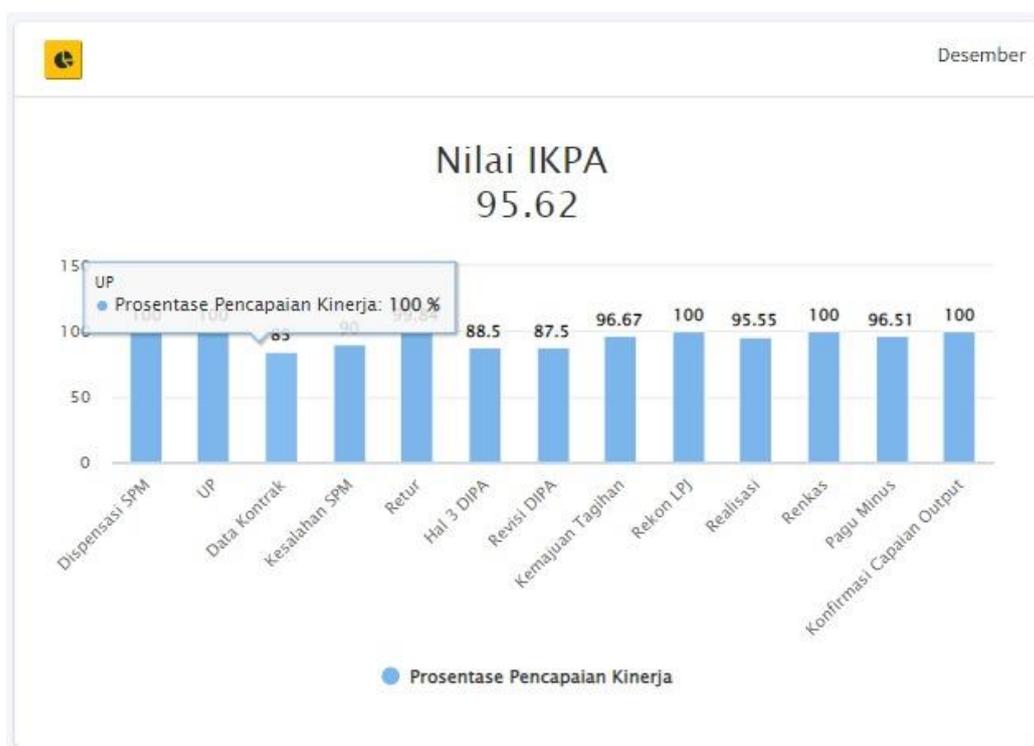
Untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun 2020 serta dengan target tahun akhir Renstra yaitu 2024 dapat disampaikan di dalam tabel berikut.

**Tabel 47.** Perbandingan Capaian dan Target IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko

No	Nama IKU	Realisasi		Target	
		2020	2021	2021	2024
16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko	-	95.62	95	98

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selalu berusaha menyelenggarakan administrasi keuangan yang akuntabel dengan meningkatkan penilaian atas pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan seluruh komponen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Capaian penilaian IKPA tahun 2021 sebesar 95.62% dipengaruhi oleh menurunnya serapan anggaran, penyampaian data kontrak dan revisi DIPA akibat *refocusing* anggaran.

**Grafik 3. Grafik Nilai IKPA Tahun 2021**



Faktor internal yang mendukung tercapainya administrasi keuangan yang akuntabel adalah para pengelola keuangan yang selalu menyelesaikan tagihan tepat waktu, pengelolaan UP/TUP tepat sasaran dan tepat guna, berkurangnya kesalahan SPM, dan berkurangnya retur dan pagu minus. Sedangkan faktor eksternal yang mendukung tercapainya administrasi keuangan yang akuntabel adalah koordinasi yang baik dengan pihak eksternal dalam mencapai administrasi keuangan yang akuntabel terutama KPPN Jakarta VI yang selalu sigap membantu dalam konsultasi keuangan.

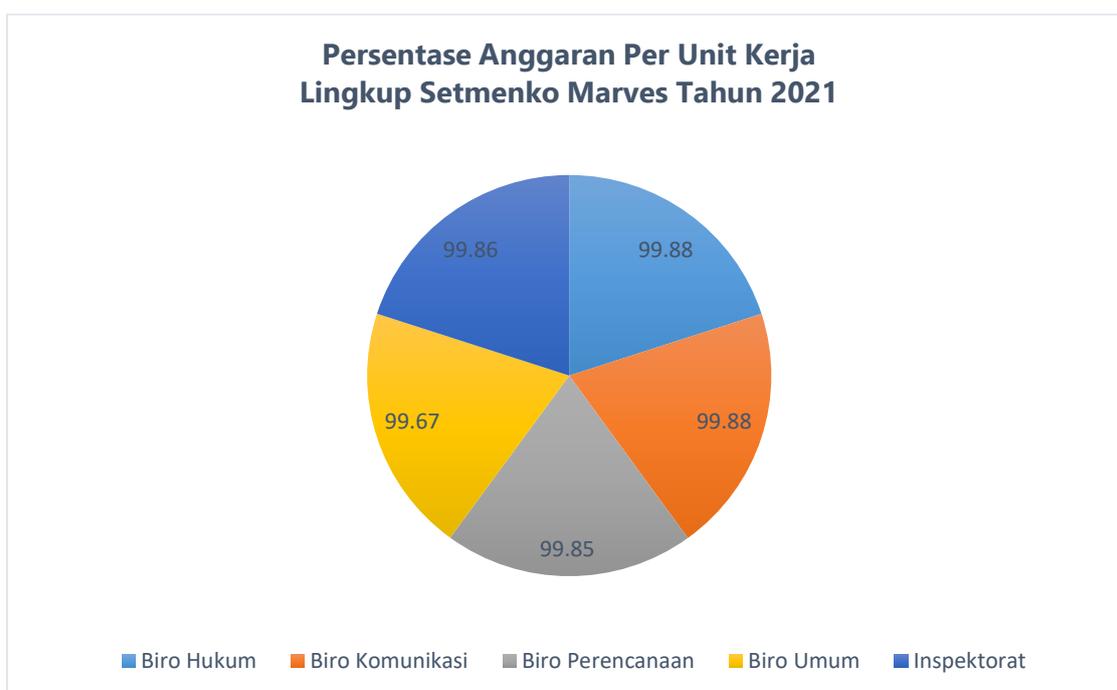
Anggaran yang diberikan dalam mendukung pencapaian IKU ini digunakan untuk melaksanakan rapat koordinasi dan operasional pengelola keuangan dalam mengelola administrasi keuangan yang akuntabel. Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka rekonsiliasi data dan pencocokan dokumen pendukung administrasi keuangan unit kerja. Koordinasi ini dilaksanakan guna mencapai kecocokan data sehingga berkurangnya bias dan *misstatement*. Berkurangnya anggaran dikarenakan *refocusing* menyebabkan berkurangnya koordinasi secara fisik dengan unit kerja dan berkurangnya sosialisasi atas peraturan-peraturan baru terkait administrasi keuangan yang bisa diselenggarakan oleh kementerian keuangan.

Dukungan SDM yang kompeten di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan membantu terselenggaranya administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel. Pembagian tugas dan kewajiban yang tepat meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelola keuangan. Integritas dan profesionalisme pengelola keuangan membantu tercapainya pengelolaan keuangan yang akuntabel.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan data OMSPAN, pagu anggaran awal Setmenko Marves tahun 2021 adalah sebesar Rp174.096.418.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), setelah melalui 4 (empat) kali *refocusing* dengan total *refocusing* sebesar Rp 4.374.279.000,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp169.722.139.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp169.250.762.013,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Belas Rupiah) atau 99,72%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp471.376.987,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Adapun rincian realisasi anggaran tiap unit Eselon II dapat dilihat dalam grafik berikut:

**Grafik 4.** Diagram Realisasi Anggaran Tahun 2021



**Tabel 48.** Data Realisasi Per Unit Kerja

UNIT KERJA	Pagu Awal	PAGU	REALISASI	%
<b>Setmenko</b>	<b>174.096.418.000,00</b>	<b>169.722.139.000</b>	<b>169.250.762.013</b>	<b>99,72</b>
<b>Biro Hukum</b>	8.000.000.000,00	6.410.329.000	6.402.880.632	99,88
<b>Biro Komunikasi</b>	28.300.000.000,00	26.600.000.000	26.566.994.317	99,88
<b>Biro Perencanaan</b>	10.000.000.000,00	8.032.177.000	8.020.304.645	99,85
<b>Biro Umum</b>	123.796.418.000,00	125.592.857.000	125.178.080.971	99,67
<b>Inspektorat</b>	4.000.000.000,00	3.086.776.000	3.082.501.448	99,86

### 3.3 Dukungan Sumber Daya Manusia

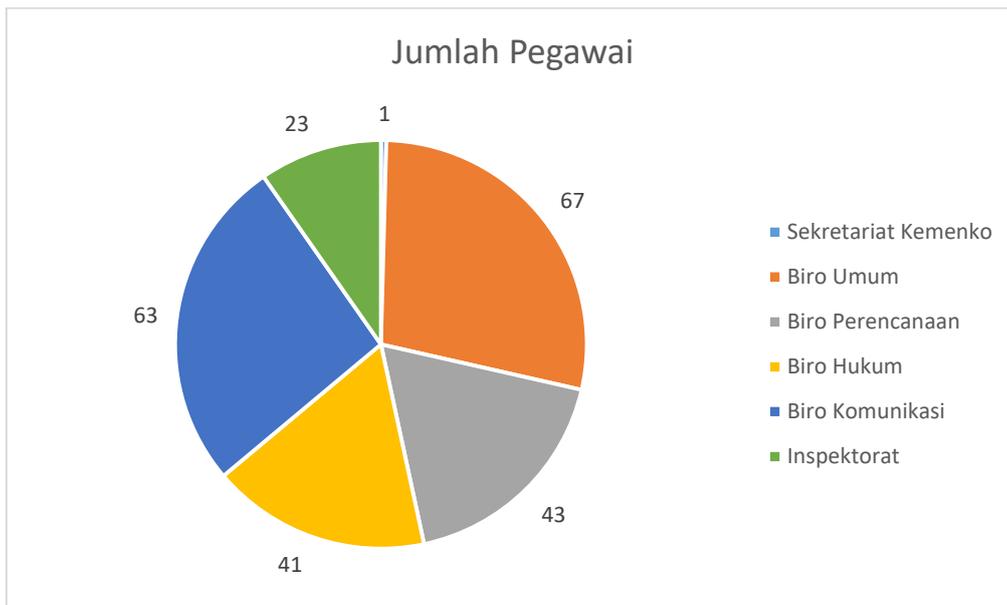
Dukungan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kemenko Marves berjumlah 238 Pegawai yang terdiri dari 153 pegawai PNS dan 85 pegawai Non PNS. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut.

**Tabel 49.** Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Setmenko Marves

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jabatan				
		L	P	Eselon II A	Eselon III A	Eselon IV A	Fungsional	Pelaksana
1.	Sekretariat Kemenko	1	0	0	0	0	0	0
2.	Biro Umum	35	32	1	1	2	15	26
3.	Biro Perencanaan	22	21	1	3	9	1	29
4.	Biro Hukum	21	20	1	-	-	19	6
5.	Biro Komunikasi	17	16	1	3	8	2	19

Sumber: Bagian Kepegawaian, Biro Umum

**Grafik 5.** Jumlah Pegawai Lingkup Setmenko Marves



### 3.4 Analisa Sumberdaya Anggaran

Pagu anggaran awal Setmenko Marves tahun 2021 adalah sebesar Rp174.096.418.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Empat Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), setelah melalui 4 (empat) kali refocusing dengan total refocusing sebesar Rp 4.374.279.000,00 (Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp169.722.139.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Dari total anggaran tersebut capaian kinerja mencapai 97,58%. Adapun penjelasan realisasi anggaran terhadap capaian kinerja adalah sebagai berikut:

### 1. Stakeholders Perspective

Stakeholders Perspective terdiri dari 1 (satu) SS, dengan capaian sebesar 93,98%. Capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan IKU Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves yang memiliki capaian sebesar 93,98%. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp31.448.055.214,- (Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
1	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	Rp31.448.055.214,-	Rp31.371.544.570,-	93,98%	24%

### 2. Customer Perspective

Customer Perspective terdiri dari 1 (satu) SS, dengan capaian sebesar 85,97%. Capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima dengan 5 IKU yang memiliki capaian sebesar 85,97%. Jumlah Pagu pada SS ini sebesar Rp 49.389.891.928,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
1	Nilai SAKIP Kemenko Marves	Rp2.008.044.250,-	Rp2.005.076.161,-	85,74%	15%
2	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan	Rp1.602.582.250,-	Rp1.600.720.158,-	84,29%	12%
3	Indeks SPBE	Rp8.866.666.666,-	Rp8.855.664.772,-	93,33%	12%
4	Indeks Profesionalitas ASN	Rp17.941.836.714,-	Rp17.882.582.995,-	66,49%	33%
5	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Rp18.970.762.047,-	Rp18.910.083.478,-	100%	32%

### 3. Internal Business Process Perspective

Internal Business Process Perspective terdiri dari 5 (lima) SS, dengan capaian sebesar 101,33%. Capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan 1 IKU yang memiliki capaian sebesar 100%.

Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp2.008.044.250,- (Dua Miliar Delapan Juta Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
1	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	Rp2.008.044.250,-	Rp 2.005.076.161,-	100%	15%

- b. Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemartiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis dengan 1 IKU yang memiliki capaian sebesar 100%. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp1.602.582.250,- (Satu Miliar Enam Ratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
1	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Diharmonisasi	Rp1.602.582.250,-	Rp1.600.720.158,-	100%	12%

- c. Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik dengan 1 IKU yang memiliki capaian sebesar 96%. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp8.866.666.666,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enap Puluh Enam Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
1	Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi	Rp8.866.666.666,-	Rp8.855.664.772,-	96%	12%

- d. Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten dengan 1 IKU yang memiliki capaian sebesar 92%. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp17.941.836.714,- (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
1	Persentase Pejabat yang Sesuai Standar Kompetensi	Rp17.941.836.714,-	Rp17.882.582.995,-	92%	33%

- e. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan 2 IKU yang memiliki capaian sebesar 110%. Jumlah Pagu pada SS ini sebesar Rp18.970.762.047,- (Delapan Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
1	Persentase Temuan Finansial BPK	Rp1.028.925.333,-	Rp1.027.500.482,-	120%	14%
2	Persentase Pemenuhn Laporan Keuangan Tepat Waktu	Rp17.941.836.714,-	Rp17.882.582.995,-	100%	33%

#### 4. Learning and Growth Perspective

Learning and Growth Perspective terdiri dari 3 (tiga) SS, dengan capaian sebesar 107,39%. Capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut

- a. Tersedianya SDM yang Kompeten dengan 1 IKU yang memiliki capaian sebesar 120%. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp17.941.836.714,- (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
1	Persentase SDM yang Kompeten	Rp17.941.836.714,-	Rp17.882.582.995,-	120%	33%

- b. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dengan 2 IKU yang memiliki capaian sebesar 104,46%. Jumlah Pagu pada SS ini sebesar Rp3.610.626.500,- (Tiga Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (RP)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
1	Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko	Rp1.602.582.250,-	Rp1.600.720.158,-	106,25%	12%

2	Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko	Rp2.008.044.250,-	Rp2.005.076.161,-	102,67%	15%
---	---	-------------------	-------------------	---------	-----

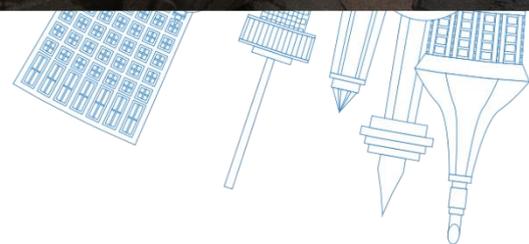
- c. Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel dengan 1 IKU yang memiliki capaian sebesar 100,65%. Jumlah Pagu pada IKU ini sebesar Rp17.941.836.714,- (Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah). Realisasi atas kegiatan tersebut seperti terlihat pada tabel berikut ini:

No	IKU	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian IKU	Efisiensi Anggaran
1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko	Rp17.941.836.714,-	Rp17.882.582.995,-	100,65%	33%

Secara keseluruhan perbandingan capaian IKU dengan realisasi sumberdaya anggaran seimbang. Capaian kinerja adalah sebesar 97,58% dan tingkat serapan anggaran sebesar 99,72%.



# PENUTUP



## IV. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Laporan kinerja Setmenko Marves Tahun 2021 menyajikan secara komprehensif informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan pelaksanaan Renstra Setmenko Marves pada tahun kedua. Laporan ini menyajikan target yang berhasil dicapai dan target yang belum tercapai sesuai target serta kendala dalam pencapaiannya.
2. IKU yang mencapai target sebagai berikut: a) IKU 6 Opini BPK atas Laporan Keuangan; b) IKU 7 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP; c) IKU 8 Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi; d) IKU 11 Persentase Temuan Finansial BPK; e) IKU 12 Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu; f) IKU 13 Persentase SDM yang Kompeten; g) IKU 14 Persentase Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setmenko; h) IKU 15 Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setmenko; i) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Setmenko.
3. Sedangkan IKU yang belum mencapai target yaitu: a). IKU 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves; b) IKU 2 Nilai SAKIP Kemenko Marves; c) IKU 3 Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang – Undangan; d) IKU 4 Indeks SPBE; e) IKU 5 Indeks Profesionalitas ASN; f) IKU 9 Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi; g) IKU 10 Persentase Pejabat yang sesuai Standar Kompetensi.
4. Secara umum, capaian kinerja Setmenko Marves Tahun 2021 cukup baik, walaupun tidak maksimal dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja Kemenko Marves tercapai sebesar sebesar 97,58%, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,72%.
5. Refocusing anggaran selama tahun 2021 cukup mempengaruhi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan Setmenko Marves. Seluruh kegiatan yang direncanakan sebagian besar dapat terlaksana dengan baik, namun menurunnya tingkat kedalaman pelaksanaan kegiatan karena pengaruh refocusing anggaran sangat mempengaruhi kualitas hasil.
6. Perbandingan capaian kinerja belum dapat dilakukan terhadap seluruh capaian kinerja secara maksimal. Hal ini disebabkan tidak tersedianya data pembanding yang dibutuhkan dan dikarenakan periode penetapan target hanya bersifat tahunan. Namun demikian Setmenko Marves telah berkomitmen untuk pencapaian kinerja lebih baik.
7. Beberapa kendala dalam pencapaian target, baik keuangan maupun kinerja di Setmenko Kemaritiman adalah sebagai berikut:
  - Adanya beberapa tingkat kendali IKU yang ditentukan oleh kelembagaan lain, maka terhadap hal diluar kendali unit kerja yang belum dikeluarkan oleh Instansi pemberi nilai menjadi faktor penghambat terhadap tingkat keberhasilan pencapaian target tahunan.
  - Masih banyak ASN Kemenko Marves yang belum mengikuti jenjang diklat pimpinan, fungsional dan teknis, kualifikasi pendidikan yang belum merata dan sesuai dengan bidang tugasnya, dan masih sedikitnya pelaksanaan dan keikutsertaan pegawai dalam seminar, workshop, kursus, atau magang.

- Masih adanya jabatan yang kosong di Kemenko Marves yang dapat berdampak kepada kinerja organisasi ke depannya.

## 4.2. Langkah Perbaikan

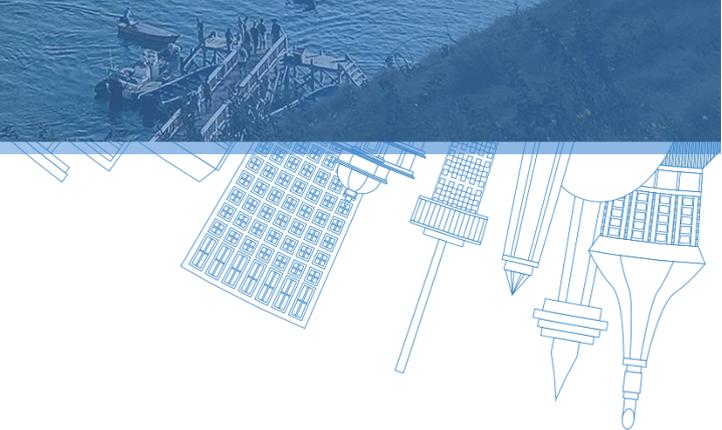
Untuk perbaikan dimasa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kapasitas pelaporan terus ditingkatkan terutama dalam menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Setmenko Marves yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati.
2. Setiap target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis maupun dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan agar dihitung capaiannya setiap tahunnya.
3. Melaksanakan pelatihan (diklat, bimtek, workshop) untuk peningkatan keahlian dan kompetensi pegawai dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.
4. Dalam hal terjadi pemotongan anggaran, target hendaknya tidak langsung dilakukan perubahan/penurunan, namun yang harus dilakukan perubahan adalah strategi dalam pencapaian kinerja.
5. Agar penghitungan capaian IKU dapat lebih relevan, setiap unit kerja lingkup Setmenko hendaknya menyampaikan data capaian kinerja secara reguler di dalam aplikasi kinerja Kemenko Marves sehingga progress dapat segera diketahui dan kendala dapat segera diidentifikasi.
6. Perlu dilakukan peningkatan pemutahiran perencanaan dengan teknologi informasi, pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematis analisis yang lebih komprehensif.
7. Laporan Kinerja agar dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja ditahun mendatang, sehingga target kinerja dapat dicapai dan dihitung capaiannya pada akhir Renstra Setmenko Marves tahun 2024.

Harapannya, laporan kinerja ini dapat menjadi umpan balik dalam proses capaian kinerja pada tahun mendatang, sehingga SAKIP di Setmenko Marves dapat berjalan dengan baik. Melalui pelaksanaan SAKIP yang baik diharapkan Setmenko Marves dapat merealisasikan sasaran dan target kegiatan sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan. Tujuan akhirnya adalah masyarakat dapat merasakan manfaat yang baik dan signifikan akan keberadaan Kemenko Marves.



# LAMPIRAN



## LAMPIRAN

**LAMPIRAN I  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIS KEMENTERIAN  
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI**

**TARGET KINERJA TAHUN 2021  
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN INVESTASI**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN
<b>Stakeholders Perspective</b>			
SS.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel dan Kapabel di Kemenko Marves	1 Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	80
<b>Customer Perspective</b>			
SS.2	Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Prima	2 Nilai SAKIP Kemenko Marves	80
		3 Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang Undangan	3,5
		4 Indeks SPBE	3
		5 Indeks Profesionalitas ASN	85
		6 Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
<b>Internal Business Process Perspective</b>			
SS.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	7 Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	100
SS.4	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	8 Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi	100
SS.5	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Elektronik	9 Persentase Layanan Informasi yang Terpenuhi	100
SS.6	Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten	10 Persentase Pejabat yang sesuai Standar Kompetensi	100
SS.7	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	11 Persentase Temuan Finansial BPK	<= 2,5
		12 Persentase Pemenuhan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100

Scan untuk Download :



SOSIAL MEDIA KAMI :

 [www.maritim.go.id](http://www.maritim.go.id)  [kemenkomarves](#)  [kemenkomarves](#)  [kemenkomarves](#)

  [Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi](#)